

ISBN :

Katalog dalam Terbitan:

IDE DAN WACANA KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si

Desain cover/layout:

Edisi Perdana

Bulan Juni 2017

Diterbitkan Oleh

Penerbit MADENATERA

MEDAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaniirahim

Assalamualaikum Wr Wb

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad, Tufiq, Hidayah dan Hinayah Nya penerbita Buku yang berjudul : Ide dan Wacana Kebijakan Publik ini dapat diselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan artikel Penulis dalam berbagai sudut pandang tentang persoalan-persoalan publik, yang bersumber dari berbagai isu aktual dan pembicaraan pembicaraan ditengah-tengah masyarakat.

Penulis menyikapi isu-isu aktual tersebut dengan mengulas dan mengupasnya dalam bentuk tulisan artikel koran dan beberapa diantaranya sudah pula diterbitkan pada Harian Waspada Medan.

Memang apa yang menjadi topik bahasan dan uraian dalam buku ini masih dalam ruang lingkup provinsi Sumatera Utara, namun setidaknya dapat jugamenjadi rujukan semua pihak yang memerlukan, khususnya yang tertarik untuk menindaklanjutinya dalam bentuk Riset Kebijakan Publik.

Untuk itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Isteri Tercinta Rizkida Zahra Nasution, SE beserta anak-anak Ariz Muflih Muttaqi, Isfahani Nadira Ahda dan Zulfa Wirza Fitria yang selalu memberikan inspirasi bagi Penulis dalam mengulas berbagai Permasalahan publik
2. Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution, MSIE ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang banyak memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan buku ini
3. Dr. Iskandar Muda, SE, M.Si, AK, CA teman sejawat yang selalu memberikan masukan untuk penyempurnaan buku ini
4. Dr. Nasirwan, SE, M.Si, Ak. CA selaku kakanda senior yang selalu memberikan motivasi kemajuan untuk Penulis
5. Dr. Arfan Ikhsan, SE, M.Si selaku pimpinan penerbit Madenatera yang berkenan menyempurnakan dan menerbitkan buku ini
6. Seluruh keluarga besar Penulis baik di Indrapura, Kota Matsum dan Pematang Siantar yang senantiasa mendoakan Penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu demi kesempurnaan buku ini

Akhirnya Penulis juga mengharapkan saran, kritikan, tanggapan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan buku ini dimasa mendatang.

Billahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamualikum WR WB

Medan, Juni 2017
Penulis,

Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si

SINOPSIS

Buku ini merupakan kumpulan artikel/tulisan yang memuat berbagai isu dan permasalahan kebijakan publik dalam rangka menyampaikan ide, gagasan dan wacana Penulis kepada Publik khususnya masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang melandasi pemikiran penulis adalah banyaknya persoalan-persoalan yang muncul ditengah tengah-tengah masyarakat dan seharusnya segera mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak yang terkait.

Memang buku ini belumlah tersistematis pembahasannya karena berbagai persoalan yang muncul disikapi dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Isu-isu yang ditulis dalam buku ini adalah yang berkenaan dengan:

1. Pemerintahan baik Pusat dan Daerah
2. Perekonomian
3. Pendidikan
4. Olahraga
5. Pariwisata
6. Infrastruktur
7. Agama Islam

Perlu dijelaskan bahwa beberapa artikel dalam buku ini juga telah dipublikasikan dan terbit pada kolom Opini pada Harian Nasional Waspada terbitan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dengan adanya buku yang berjudul: ***"Ide dan Wacana Kebijakan Sektor Publik"*** ini, maka diharapkan juga dapat mendorong para pengambil kebijakan yang terkait dan satekholder lainnya mau lebih peduli dan sungguh-sungguh memperbaiki kinerja publiknya masing-masing.

Buku ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para peneliti yang tertarik pada permasalahan kebijakan publik dalam berbagai aspek dan dimensi sehingga kedepan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat lebih mendapatkan perhatian dari para pihak yang terkait guna penyelesaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SINOPSIS	ii
DAFTAR ISI	iv
1. KUNJUNGAN RI-1 DI PROVINSI SUMATERA UTARA	1
2. URBANISASI DATANGNYA MAHASISWA BARU	7
3. MENDORONG OPTIMISME TAX AMNESTY KITA.....	12
4. AYO ! DUKUNG DANAU TOBA JADI DESTINASI WISATA KELAS DUNIA.....	17
5. SENSUS EKONOMI 2016 : CERMIN PEREKONOMIAN KITA.....	22
6. GELIAT EKONOMI PON 19 DI PROVINSI JAWA BARAT	25
7. WACANA KEBIJAKAN FULLDAY SCHOOL.....	31
8. AUDIT PARPOL PERAN STRATEGIS AKUNTAN.....	34
9. PENTINGNYA AKUNTANSI MESJID.....	40
10. KONSEP PROFESIONALISME SDM ISLAM.....	45
11. ANCAMAN MAUT JALINSUM KITA.....	49
12. PELABUHAN HUB INTERNASIONAL DI KUALA TANJUNG.....	52
13. PERANAN KELITBANGAN DAERAH	54
14. MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT DI SUMUT	62
15. KEBIJAKAN STRATEGIS TATAKELOLA PEMDA	67
16. PERJUANGAN TIM PON SUMUT	77
17. REVITALISASI PENDIDIKAN AL-WASHLIYAH.....	82

1. KUNJUNGAN RI-1 DI PROVINSI SUMATERA UTARA

A. PENGANTAR

Presiden Republik Indonesia mulai dari Presiden Soekarno sampai Jokowi terus melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini. Tapi sebenarnya apa makna dan manfaat dari kunjungan tersebut, harus dicermati secara utuh (holistik) dan menyeluruh (komprehensif). Menurut Penulis perlulah kita semua elemen masyarakat Sumatera menyikapi dan mencermati sederetan kunjungan yang terus dilaksanakan oleh orang Nomor satu di Republik ini, agar kiranya kunjungan kerja presiden kita ke Sumut kedepannya tidak sebatas kunjungan dan seremonial belaka akan tetapi memiliki dampak bagi kemajuan Sumut yang lebih baik. Suatu hal yang logis adalah jika kedatangan Presiden dikaitkan dengan penyahutan aspirasi masyarakat Sumut dengan berbagai persoalan yang belum tuntas seperti kasus pertanahan dan keterbatasan anggaran provsu, pemkab dan pemko yang ada di Sumut.

Soekarno (1945-1967)

Pada masa ini kunjungan presiden RI sangat erat kaitannya dengan konsolidasi persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme yang mana bangsa Indonesia baru saja meraih kemerdekaan. Presiden Soekarno memiliki historis yang sangat kuat dengan Sumatera Utara dan sampai saat ini bekas rumah pengasingan Bung Karno terdapat di Wisma Bukit Kubu Berastagi, Tanah Karo dan Kota turis parapat, Simalungun.

Tercatat dari berbagai sumber Soekarno pernah ke Berastagi 21 Juli 1951, dan salah satu momen terindah kedatangan Soekarno adalah saat membuka Pekan Olah raga Nasional (PON) ke III di Medan tepatnya tanggal 20 September 1953. Wajar saja jika Presiden pertama RI belum mampu memberikan apa-apa kepada Sumut karena memang kondisi bangsa yang baru Merdeka, akan tetapi antusias penyambutan presiden oleh warga kala itu diyakini sangat luar biasa untuk bertemu sang Proklamator RI, terkhusus mendengarkan orasi-orasinya yang mampu membakar semangat juang rakyat Indonesia.

Soeharto (1967-1998)

Presiden Soeharto biasanya datang ke Sumut dalam rangka meresmikan proyek-proyek pembangunan, dan pada masa itu kedatangan presiden sangat dielu-elukan masyarakat. Acara sangat steril bahkan tanya jawab pun sudah diatur sedemikian rupa. Tidak dapat dipungkiri presiden Soeharto sebagai bapak Pembangunan Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi berbasis keamanan dan stabilitas politik. Proyek raksasa Seperti PLTA Asahan yang diresmikan Soeharto tahun Pada tanggal 20 Januari 1982, dan operasi tahap pertama Pabrik Peleburan Aluminium (PPA) di Kuala Tanjung juga diresmikan langsung oleh Soeharto pada tahun 1984.

Pada kesempatan itu, presiden Soeharto mengatakan bahwa Proyek Asahan, sebagai "impian yang menjadi kenyataan" serta menyatakan harapan-harapan bangsa Indonesia atas Proyek tersebut. Kunjungan Presiden kedua RI ini juga menyerap aspirasi masyarakat yang mana tokoh-tokoh Sumut banyak berkiprah menjabat ditingkat nasional sebagai Wakil Presiden yaitu Adam Malik, kemudian juga sederetan tokoh Sumut masuk dalam jajaran Menteri era Presiden Soeharto seperti Akbar Tanjung, dll. Pada Masa itu Sumut terkenal sebagai basis Golkar di Sumatera, hal ini menjadi dukungan politik yang kuat bagi kepemimpinan presiden Soeharto.

Baharudin Jusuf Habibie (1998-1999)

Masa kepemimpinan presiden Habibie sangatlah singkat karena memang Habibie adalah presiden masa transisi dimana terjadinya reformasi pasca lengsernya presiden Soeharto. Penulis sendiri belum menemukan tanggal kunjungan Habibie ke Sumut dalam kapasitasnya sebagai presiden. Hal ini sangatlah wajar karena tugas presiden Habibie saat itu sangatlah berat untuk mencegah terjadinya revolusi di negeri ini. Namun tidak dipungkiri bahwa Habibie berhasil menyelamatkan bangsa Indonesia dari kondisi kritis baik secara ekonomi dan politik.

Program utama adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang kala itu memang harus diluncurkan untuk mengatasi rakyat yang kesulitan dalam ekonomi dan juga Habibie harus melaksanakan Letter Of Inten (LOI) Indonesia dengan Indonesia Monetary Fund (IMF), jadi Habibie belum sempat melakukan lawatan kerja ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan pada suatu kesempatan Habibie berkunjung ke

sebuah pasar tradisional di Jakarta, beliau sangat terkejut dengan kondisi kumuhnya pasar tradisional yang ada.

Abdul Rahman Wahid /Gus Dur (1999 - 2001)

Presiden datang ke Sumut dalam acara formal maupun informal, bahkan tercatat Abdul Rahman Wahid pernah menghadiri undangan pesta Perkawinan salah satu sahabatnya di Jl. HM. Joni Medan. Kunjungan presiden Abdul Rahman Wahid memang belum memberikan banyak manfaat bagi Sumut, karena pada masa itu masih terjadi gonjang-ganjing politik, dan Abdul Rahman Wahid sendiri banyak melakukan lawatan ke luar negeri.

Abdul Rahman Wahid masih lebih banyak melakukan kunjungan pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa sebagai basis, ini sangat wajar dan dapat dimaklumi dan Abdul Rahman Wahid juga pernah melakukan sebuah kunjungan khusus untuk melihat matahari tenggelam diakhir tahun 31 Desember 1999, menyambut matahari terbit 1 Januari 2000 di Provinsi Papua pada tahun baru saat masuknya abad milenium. Kunjungan Gus Dur ke Sumut belumlah signifikan untuk kemajuan Sumut, karena masih sebatas seremonial.

Dukungan politik untuk Gus Dur dari Sumut pun relatif kecil karena memang provinsi ini bukan basis ormas NU maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

Presiden Megawati sangat sering berkunjung ke Sumut, bahkan setiap masa Pemilu baik legislatif, Pilres, maupun Pemilu pada Megawati tidak pernah absen untuk memberikan orasi di lapangan lapangan kampanye. Semasa jadi Presiden, kunjungan kerja Megawati menyentuh semua elemen masyarakat Sumut seperti abang becak, supir, buruh, petani dan pedagang kaki lima (PKL), dan juga alim ulama di pesantren. Bahkan secara sebaran Kabupaten Kota pun Megawati mendatangi banyak tempat di Sumut seperti Langkat, Deli Serdang, Karo dan Simalungun, tentunya Medan sebagai Ibukota Provinsi. Hal yang paling menarik dicermati dalam setiap kunjungan Megawati adalah antusiasnya kader PDIP dalam menyambut ketua Umum partainya, karena Sumut juga menjadi andalan perolehan suara PDIP dalam setiap event Pemilu. Tentunya kunjungan kerja Megawati sebagai presiden di Sumut juga berkenaan dengan pembangunan daerah dan pencaangan proyek proyek Pusat yang ada di daerah.

Presiden Megawati sangat serius memperhatikan Sumut dan banyak usulan proyek daerah yang di tampung aspirasinya pada masa itu, namun karena keterbatasan anggaran maka banyak proyek di Sumut yang batal dan tidak dapat direalisasikan. Sayangnya lagi Megawati tidak terpilih pada Pilpres 2004, sehingga kandaslah harapan Sumut pada Megawati.

Susilo Bambang Yudhoyono/ SBY (2004-2014)

Selama rentang masa jabatan sepuluh tahun Presiden SBY, jelas tercatat banyak sekali kunjungan presiden SBY ke Sumut. Diantaranya kunjungan ke Nias melihat korban gempa tahun 2004, perayaan natal nasional yang dipusatkan di Pulau Nias tahun 2005 bahkan dihadiri oleh presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan dalam kesempatan itu SBY menyatakan ada dua alasan mendorong dirinya untuk datang kembali mengunjungi Pulau Nias menjelang akhir tahun 2005 ini, yaitu untuk melihat secara langsung sampai sejauh mana pelaksanaan dan keberhasilan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pasca-tsunami dan gempa bumi, dan juga untuk ikut merayakan Natal bersama segenap masyarakat Nias. Kemudian SBY juga mengunjungi Korban Sinabung 20 September 2010, dan yang paling monumental adalah Presiden SBY meresmikan Bandara Kuala Namu 27 Maret 2014.

Presiden SBY juga mengunjungi banyak Kabupaten/Kota mulai dari Medan, Deli serdang, Sergai, Tebing, Siantar, panen raya di Simalungun, hingga pernah bermalam di Kabupaten Toba Samosir. Belum lagi kedatangan SBY dalam kegiatan Kampanye Partai Demokrat dan Kampanye Pilpres. Wajar saja selama sepuluh tahun menjadi presiden pastilah banyak agenda yang dilaksanakan di Sumut. Tapi dengan kunjungan yang demikian intens dilaksanakan Sumut belum juga mendapatkan anggaran berimbang sesuai potensi perkebunan yang dimiliki, bahkan sampai sekarang wacana bagi hasil sektor perkebunan juga tidak terwujud, walaupun legislator dari Partai Demokrat asal Sumut banyak duduk di DPR-RI hasil Pemilu legislatif 2009, dimasa itu.

Joko Widodo /Jokowi (2014 s/d sekarang)

Terakhir adalah Presiden Jokowi. Tercatat volume kerja blusukan kunjungan presiden Jokowi ke Sumut sangat tinggi, mulai dari melihat Korban Eurupsi Gunung Sinabung, Meresmikan Ground Breaking pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Meresmikan KEK Sei

Mangkei, Meresmikan Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung, Menghadiri Karnaval budaya, dan sekarang ke Pulau Nias. Tapi kedatangan presiden masih tetap dalam kapasitas acara yang dikemas oleh pemerintah pusat.

Seharusnya polarisasi kunjungan presiden Jokowi tidak sama dengan banyak presiden sebelumnya yang terpatron dalam acara seremonial dan peresmian proyek nasional. Presiden Jokowi harus punya pola dan ciri khas sendiri dalam mengunjungi daerah, misalnya konsentrasi pada penambahan APBD provinsi Sumut, yang sampai hari ini masih berkulat pada rentang anggaran Rp. 8 s/d 9 Triliun saja. Padahal Jumlah penduduk Sumut sudah mencapai 13 Juta jiwa dan Kab/Kota sudah sebanyak 33.

Kata kuncinya adalah kuantitas kunjungan tidaklah perlu, tapi kualitas kunjungan yang harus diperbaiki dengan sasaran yang lebih tepat meningkatkan kemajuan Sumut. Sangat sulit dibandingkan APBD Sumut dengan DKI, Jatim, Jabar dan Jateng, padahal sejarah mencatat kontribusi Sumut untuk stabilitas politik kepemimpinan nasional sangat besar dan strategis. Sumut adalah penyumbang suara terbatas dalam setiap kepemimpinan nasional mulai dari Soekarno hingga Jokowi. Mestinya Sumut harus dapat porsi kue pembangunan nasional yang juga signifikan.

B. KESIMPULAN

Setelah mencermati kunjungan yang dilakukan oleh semua presiden RI yang datang ke Sumut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Presiden RI datang ke Sumut masih sebatas seremonial saja seperti peresmian proyek proyek pembangunan khususnya program pemerintah pusat yang ada di Sumut
2. Kegiatan lainnya juga masih sebatas menghadiri suatu event kegiatan tingkat nasional yang dipusatkan di Sumut seperti Pembukaan PON, MTQ, perayaan Natal atau event lainnya
3. Kunjungan Presiden juga terkait dengan event Pemilu baik legislatif, pilpres dan pemilukada dimana Sumut juga diharapkan menjadi penyumbang suara masing-masing partai politik yang berpihak pada presiden
4. Kunjungan presiden yang bersifat insidental ke Sumut terkait bencana alam yang terjadi di provinsi ini

5. Lokasi kunjungan Presiden RI masih terpusat di kota Medan, Batubara dengan keberadaan PT. Inalum, kawasan Tapanuli dan Pulau Nias.
6. Kunjungan Presiden RI belum merata pada semua kawasan yang ada di Sumut seperti Pantai Timur dan Tapanuli bagian Selatan/Sumatera Tenggara, dan ini perlu menjadi perhatian Pemprovsu. Katakanlah seperti Kota Tanjungbalai yang juga potensial menjadi pelabuhan internasional dekat dengan negara tetangga Malaysia melalui pelabuhan Teluk Nibung dan Bagan Asahan. Kab. Labuhan Batu, Utara dan Selatan, serta Paluta dan Palas yang juga potensial sebagai sentra hilirisasi hasil perkebunan kelapa sawit yang berbatasan dengan Riau, Kota Padangsidimpuan dan Panyabungan yang juga berpotensi sebagai Kota Hinterland penghubung perekonomian Sumut-Sumbar.
7. Kunjungan presiden RI belum berbanding lurus dengan peningkatan Anggaran Pemprovsu, untuk itu Gubernur, Bupati/Walikota dan para Ketua DPRD se Sumut hendaknya dapat memanfaatkan momen kunjungan RI-1 Ke Sumut sebagai momentum pengajuan permohonan dan lobi peningkatan anggaran pembangunan, dan tidak sebatas mengikuti acara-acara seremonial saja. Semoga Sumut maju kedepannya.

2. URBANISASI DATANGNYA MAHASISWA BARU

A. PENGANTAR

Fenomena urbaniesasi (perpindahan masyarakat kewilayah perkotaan) pada saat memasuki tahun ajaran baru dan awal perkuliahan sudah menjadi fenomena dan fakta tahunan yang kerap terjadi dan dialami kota-kota besar di Indonesia seperti Kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Makasar dan tentunya juga Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selama ini urbaniesasi sangat erat kaitannya dengan arus balik pemudik para perantau yang turut membawa serta keluarga kerabat dari kampung untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar tersebut.

Akan tetapi sebenarnya masih ada potensi laten arus urbaniesasi yang juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, yaitu urbaniesasi datangnya mahasiswa baru yang terjadi sebagai akibat dimulainya tahun ajaran baru, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyikapi dan mengantisipasi laju urbaniesasi kota-kota besar di Indonesia.

Tentunya dengan mengendalikan arus urbaniesasi, kehidupan masyarakat perkotaan menjadi lebih baik, dan dapat mengantisipasi kepadatan penduduk. Untuk itulah tulisan ini akan mengulas pentingnya mengantisipasi urbaniesasi datangnya mahasiswa baru di wilayah perkotaan seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru.

B. URBANISASI OLEH MAHASISWA BARU

Tanpa disadari bahwa dimulainya awal tahun ajaran baru dan awal perkuliahan semester ganjil Tahun Akademik 2016/2017 memberikan dampak besar terjadinya perpindahan penduduk dari beberapa daerah kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara ke Kota Medan. Walaupun perpindahan ini adalah bersifat sementara, sekitar 4 s/d 5 tahun sejak para mahasiswa baru duduk menjalani perkuliahan sampai tamat, namun setelah lulus para mahasiswa yang menjadi sarjana baru tersebut juga sangat berpotensi menjadi penduduk permanen di Kota Medan, karena para sarjana baru

biasanya lebih memilih tinggal dan mencari pekerjaan di Kota Medan, ketimbang kembali kekampung halamannya masing-masing.

Jika memperhatikan data penerimaan mahasiswa baru di Kota Medan, setiap tahunnya terus mengalami trend kenaikan dan tahun 2016 ini saja pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kota Medan yaitu, 1.Universitas Sumatera Utara (USU) menerima sekitar 6.000 mahasiswa, 2.Universitas Negeri Medan (Unimed) 5.000 mahasiswa, 3.Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) sekitar 3.000 mahasiswa, 4. Politeknik Negeri Medan (Polmed) 2.000 mahasiswa, ditambah lagi potensi penerimaan mahasiswa PTS yang ada di Kota Medan sekitar 10.000 mahasiswa, maka total penerimaan mahasiswa PTN dan PTS sudah mencapai sekitar 26.000 mahasiswa, yang sebahagian besar mahasiswa tersebut berasal dari daerah kab/kota di Sumut, bahkan ada juga yang datang dari provinsi lainnya seperti Aceh, Sumbang dan Riau.

Keberadaan PTN inilah yang menjadi daya tarik perpindahan sebahagian penduduk daerah sebagai mahasiswa baru ke kota Medan, baik bersifat sementara selama masa perkuliahan berlangsung maupun pindah secara permanen setelah menyelesaikan studinya.

Hal ini dapat dipahami karena provinsi Sumatera Utara hanya memiliki 4 (empat) perguruan Tinggi Negeri, yang semuanya terletak di Kota Medan dan hanya ada satu PTN Negeri ada di daerah yaitu IAIN Padangsidimpuan. Berbeda jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, dimana Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsinya. Aceh memiliki lebih banyak PTN dibandingkan Sumut yaitu (1) Universitas Syiah Kuala (2) Politeknik Aceh, dan (3) UIN Ar-Raniry di Kota Banda Aceh, (4) Universitas Malikussaleh, (5) STAIN Malikussaleh, dan (6) Politeknik Negeri di Lhokseumawe, (7) Universitas Teuku Umar di Meulaboh, (8) Universitas Samudra Langsa, (9) STAIN Zawiyah Cot Kala di Langsa, , Langsa, dan (10) STAIN Gajah Putih di Takengon, tentunya ini juga dapat mempengaruhi perpindahan calon mahasiswa kabupaten/kota yang ada di Aceh berpindah ke Kota Banda Aceh karena tersedianya PTN di daerahnya masing-masing.

C. URBANISASI DI KOTA MEDAN

Secara khusus di Kota Medan, urbaniesasi tentunya juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, pengawasan domisili

kependudukan baik bersifat sementara maupun pindah permanen, serta faktor keamanan lingkungan. Kalau melihat pada angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Medan tahun 2014, diketahui pertumbuhan tersebut sebesar 0,26 persen/tahun, dengan jumlah penduduk saat ini sebesar 2.122.804 juta jiwa (BPS, 2015). Kemudian jika menggunakan data dasar jumlah penduduk tahun 2007 sebesar 2.083.156 jiwa, maka selama kurun waktu sepuluh tahun 2007-2017 di Kota Medan sudah mengalami penambahan penduduk sekitar 40.000 s/d 45.000 jiwa.

Hal ini menyebabkan rasio kepadatan penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari 7.858 jiwa/KM² pada tahun 2007 menjadi 7.929 jiwa/KM² pada tahun 2008 dan meningkat kembali menjadi 8.001 jiwa/KM² pada tahun 2009, dan pada tahun 2017 diprediksi sudah mencapai 15.000 jiwa/KM².

Menurut data pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Pemko Medan, maka jika dilihat dari rasio kepadatan penduduk tersebut maka kepadatan penduduk Kota Medan relatif termasuk tinggi sehingga untuk masa mendatang menjadi salah satu tantangan demografi yang harus diantisipasi.

Jika tidak, maka dalam kurun waktu 20 s/d 50 tahun kedepan Medan akan menjadi Kota padat, macet, rawan kriminalitas, tidak nyaman dan tidak tenteram, dan Pemerintah Kota Medan juga pasti akan kesulitan melakukan penataan kawasan Kota, dan bisa saja wajah kota Medan tidak mengalami perubahan kearah kemajuan yang lebih baik, apalagi saat ini ruas jalan kota Medan semakin menyempit dengan padatnya penambahan kendaraan bermotor. Setidaknya pemerintah kota Medan harus membuat kebijakan strategis terkait urbaniesasi yang terus terjadi setiap tahunnya.

Daya tarik urbaniesasi Kota Medan bagi pencari kerja tentunya sangat besar karena Medan sebagai ibukota provinsi menjalankan semua perannya sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, bahkan pusat pendidikan dengan keberadaan PTN dan PTS yang hanya terpusat keberadaannya di Kota Medan.

Untuk jangka panjang tentunya ini tidak menguntungkan Kota Medan, apalagi penambahan penduduk tidak diikuti dengan perkembangan kawasan baru. Hal ini dapat dipahami karena keterbatasan ketersediaan lahan pengembangan wilayah Kota Medan, dan didaerah juga perguruan tinggi kurang tersedia, sebagai contoh

beberapa daerah yang sama sekali tidak memiliki PTS yakni Kab. Batubara, Dairi, Labuhan batu Selatan, Labuhanbaru Utara, Nias Barat, Nias Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai dan Tapanuli Selatan. Sedangkan yang memiliki 1 PTS seperti Tapanuli Tengah, Simalungun dan Humbang Hasundutan dan beberapa daerah lainnya memiliki 2 PTS. Kalaupun ada lebih bersifat akademik dan sekolah tinggi yang mengasuh beberapa program studi saja belum dikembangkan sampai pada tingkat Universitas yang memiliki beberapa Fakultas dan banyak pilihan program studi.

D. MENGANTISIPASI URBANISASI MAHASISWA DI KOTA MEDAN

Jika melihat jumlah penduduk Provinsi Aceh sebanyak 4.906.835 jiwa, sudah memiliki 10 PTN sedangkan jumlah penduduk Provinsi Sumut yang sudah mencapai mencapai 13.937.797 jiwa baru memiliki 4 PTN, tentulah tidak sebanding. Wajarlah kalau Angka partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) Sumut tahun 2015 baru mencapai 36,59%, padahal perkembangan Pendidikan Tinggi di suatu daerah akan memiliki dampak positif terhadap percepatan pembangunan, khususnya penyiapan sumber daya manusianya.

Kedepan Sumut sangat membutuhkan SDM yang setidaknya harus memiliki kualifikasi pendidikan S1 karena Sumut sangat secara geografis posisinya sangat strategis dalam era kerjasama ekonomi regional MEA. Kemudian Sumut juga punya kawasan pelabuhan strategis Kuala Tanjung yang akan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah barat Indonesia dengan konektifitas yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagai pusat hilirisasi industri kelapa Sawit.

Sumut juga menjadi bagian lintasan Jl. Tol Trans Sumatera dalam rangka mendukung penguatan logistik dan distribusi barang dan jasa antar provinsi di Pulau Sumatera, dan kesiapan SDM Sumut dalam mendukung danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia. Bagaimanakah kedepan kualitas SDM Sumut kalau PTN yang tersedia sangat minim di Kabupaten/Kota yang ada di Sumut.

Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat khususnya Kementerian Ristek Dikti tentang jumlah PTN yang ada Sumut padahal sebenarnya banyak PTS di daerah kab/Kota yang ada di Sumut berpotensi menjadi PTN diantaranya Universitas Asahan (UNA) di Kisaran, Universitas Simalungun (USI) di Pematang Siantar, Uniersitas

Labuhan Batu (ULB) di Rantau Prapat, dan Universitas Graha Nusantara (UGN) di Padangsidempuan, setidaknya kalau didaerah terdapat PTN maka daya serap lulusan Sekolah Menengah didaerah dapat menekan laju urbaniesasi mahasiswa baru lulusan SMA/SMK dari 33 Kab/Kota yang ada untuk belajar ke Kota Medan. Belum lagi dari pemerataan akses pendidikan tinggi akan menjadi lebih efektif dan efisien jika PTN lebih banyak tersebar di daerah Kab/Kota dan tidak terpusat di ibukota Provinsi.

E. PENUTUP

Mungkin selama ini kita menganggap bahwa urbaniesasi yang disebabkan oleh datangnya mahasiswa baru dari daerah ke Kota Medan masih bersifat wajar dan biasa, tapi sebenarnya kita harus mengantisipasi jauh kedepan sebelum terlambat. Kita bisa melihat sulitnya penataan penduduk, kawasan, keterbitan, kepadatan bahkan kekumuhan di Kota Jakarta yang berakibat kemacetan dimana-mana sebagai buah urbaniesasi yang tidak terbendung dan tidak diantisipasi dalam berbagai penyebabnya, yang mungkin saja adalah urbaniesasi mahasiswa yang setelah lulus menetap dan mencari kerja di Jakarta.

Disinilah peran dari pemkab/pemko yang memiliki PTS potensial untuk menjadi PTN agar lebih serius mengajukan perubahan tersebut kepada pemerintah pusat melalui kemenristek dikti agar PTN di daerah masing-masing segera terwujud. Berikan alokasi anggaran APBD, bentuk Tim panitia kerja yang fokus mengurusnya, susun proposal yang lengkap, bangun infrastruktur pendukung, lakukan lobi yang positif ke pemerintah pusat, dan jangan lupa siapkan calon dosennya. Semoga. Terwujud.

3. MENDORONG OPTIMISME TAX AMNESTY KITA

A. PENGANTAR

Pajak merupakan instrumen pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan tingginya pendapatan negara dari sektor pajak, maka pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, mengerakkan roda pemerintahan, dan mengatur perekonomian masyarakat. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), negara kita telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *Sistem official-assessment* oleh petugas pajak atau Fiskus menjadi sistem *self-assessment* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Sistem *Self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada satu sisi sistem ini sangat positif karena memberikan motivasi kesadaran membayar pajak pada setiap warga negara dalam melunasi kewajibannya, akan tetapi pada sisi lainnya memberikan peluang dan potensi kecurangan pajak, dengan memberikan keleluasaan bagi WP untuk menghitung sendiri pajaknya.

Alasan sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu alasan klasik yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama. Padahal, bagi wajib pajak badan, ada kewajiban membuat pencatatan akuntansi dan laporan keuangan.

Informasi akuntansi yang dibuat tersebut tentunya berfungsi sebagai alat mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan stakeholders, dan juga sumber data menghitung pajak.

Dalam praktik, sangat sering WP bertanya, berapa pajak yang harus dibayar. Terkadang tidak terlalu penting mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi.

Padahal proses penghitungan pajak tersebut yang akan menghasilkan jumlah pajak yang adil. Yakni, tidak memberatkan WP, namun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena formula tersebut sudah melalui kesepakatan pemerintah dan rakyat (melalui DPR) dalam UU Perpajakan, dan turunan regulasi petunjuk pelaksanaan teknisnya juga telah diatur dalam berbagai peraturan Menteri Keuangan.

B. TAX AMNESTY

Pada tahun 2016 ini Pemerintah RI meluncurkan kebijakan pengampunan pajak dengan terbitnya Undang Undang no 11 tahun 2016 .tentang Pengampunan Pajak. Secara khusus dalam UU tersebut pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Pengampunan Pajak bertujuan di negara Indonesia untuk (a) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; (b) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan (c) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pada prinsipnya Tax Amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak karena kebijakan ini dimensinya lebih luas. Kenapa? Karena pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih *sustainable*.

APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Untuk kebijakan di Indonesia saat ini, Tax Amnesty ini merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan untuk menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak dengan target capaian Rp. 163 Triliun. Namun sejak diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016 lalu, Tax amnesty belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan dan sampai akhir Agustus 2016 ini realisasi penerimaan negara dari kebijakan ini hanya sekitar Rp. 9 Triliun Rupiah. Jika dilihat dari kondisi ini berarti tax amnesty belum berjalan secara efektif, karena ternyata ada anggapan dari para wajib Pajak bahwa jika melaporkan asset dan pajaknya secara jujur untuk mendapatkan pengampunan di tahun 2016 akan berdampak pada beban pajak jangka panjang pada tahun-tahun berikutnya.

Berarti dengan demikian masih ada hambatan psikologis dimasyarakat yang belum didasarkan pada kesadaran membayar pajak. Memang dibanyak negara yang melakukan kebijakan Tax amnesty ini pun tidak serta merta langsung berhasil, sebagai contoh saja di Afrika Selatan setelah melakukan sosialisasi selama dua tahun targetnya hanya tercapai sebesar 30 persen saja. Jadi sebenarnya masih sangat diperlukan kerja keras pemerintah untuk meyakinkan masyarakat baik didalam maupun di luar negeri untuk mendukung secara total tax amnesty ini.

Upaya pemerintah memotong APBN tahun 2016 sebesar Rp. 137 Triliun adalah suatu terobosan yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena secara logika akademik hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi dengan kondisi keuangan negara yang ada saat ini. Namun jika pemotongan anggaran yang telah dilakukan juga tidak didukung realisasi penerimaan negara dari tax amnesty tentunya tetap menyulitkan APBN tahun 2016.

Banyak pihak beranggapan pemotongan APBN akan mempengaruhi makro ekonomi Indonesia, tapi Bank Indonesia sendiri telah menganalisis bahwa pemotongan ini memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

C. TARGET REALISTIS

Menurut Penulis, target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 163 Triliun termasuk realistis, karena dari berbagai sumber kajian potensi pajak yang dimiliki Indonesia sangatlah besar. Pemerintah ingin menerapkan pengampunan pajak karena masih ada banyak uang atau harta rakyat Indonesia yang tidak dikenakan

pajak. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan triliun. Besarnya jumlah uang masyarakat Indonesia di dalam negeri yang belum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai harta kekayaan nilainya diperkirakan mencapai Rp 1.400 triliun. Sedangkan uang orang Indonesia yang beredar diberbagai, diprediksi mencapai Rp 2.700 triliun, jadi totalnya sudah mencapai Rp 4.100 triliun. Secara normal normal saja realisasi penerimaan APBN dari sektor pajak pada dua tahun terakhir yaitu 2014, 2015 berkisar Rp1.000 sd Rp. 1.300 Triliun, dan target penerimaan APBN dari pajak tahun 2016 ini adalah Rp 1.546 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak, berarti ada 38 juta orang yang belum bayar pajak. Sementara untuk badan usaha, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2013 terdapat sekitar 25 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun berdasarkan analisis DJP, baru sekitar 5 juta perusahaan yang membayar pajak. Sangatlah memprihatinkan jika masyarakat tidak mau mendukung sepenuhnya tax amnesty ini. Tentunya kondisi tersebut yang membuat target pajak pada tahun ini tidak tercapai.

D. KAMPANYE TAX AMNESTY

Ketidakpatuhan wajib pajak dan keterbatasan DJP untuk menagih dianggap sebagai penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Untuk itu, dibutuhkan dukungan seluruh instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik untuk menyinergikan sistemnya secara online dengan DJP. Faktor utama adalah kesadaran membayar pajak masyarakat yang masih rendah apalagi sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment Sytem. Salah satu masalah tidak tercapainya target pajak adalah minimnya jumlah wajib pajak orang pribadi. Penerimaan pajak di Indonesia terlalu bergantung pada wajib pajak badan atau perusahaan. Profit perusahaan tergerus akibat melambatnya perekonomian, yang tentunya berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan perusahaan/badan usaha ke negara pun merosot.

Untuk itulah sosialisasi dan kampanye tentang tax amnesty ini harus terus dikumandangkan secara masif dan menyeluruh. Keterlibatan pemerintah daerah juga harus di kuatkan perannya.

Tidak salah juga kalau pemerintah pusat memberikan intensif khusus bagi pemerintah daerah yang berhasil memungut pajak dalam program tax amnesty ini.

Walaupun Pajak Penghasilan (PPH) adalah kewenangan pemerintah pusat, tapi dalam rangka mendorong optimalisasi pemungutannya untuk kebijakan tax amnesty ini perlu dibuat terobosan kebijakan yang bersifat sementara agar akselerasi target capaian bisa lebih terealisasi, karena pada hakikatnya Wajib pajak Badan terdaftar seluruhnya pada instansi terkait di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

E. REKOMENDASI

Mengingat pentingnya penerimaan dari sektor pajak di Indonesia, maka tulisan ini merekomendasikan bahwa Pemerintah Pusat harus lebih gencar melakukan sosialisasi tentang tax amnesty khususnya pada pemahaman bahwa kebijakan ini tidak akan berpengaruh terhadap beban pajak jangka panjang bagi WP.

Pemerintah pusat juga harus memberikan peluang dan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi/pemerintah Kabupaten/Kota untuk ikut sebagai pelaksana program pengampunan pajak, karena program ini sekarang hanya dijalankan oleh Kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak saja. Segenap masyarakat Indonesia dari seluruh kalangan wajib pajak baik perorangan maupun Badan Usaha hendaknya sepakat dan sadar pentingnya membayar pajak untuk tujuan yang lebih luas agar relaisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Untuk itu marilah kita mendukung pemerintah dan lebih optimis suksesnya tax amnesty di republik yang kita cintai ini.

4. AYO ! DUKUNG DANAU TOBA JADI DESTINASI WISATA KELAS DUNIA

A. DANAU TOBA KITA

Semua masyarakat Sumatera Utara pasti bangga mendapatkan anugerah dari Tuhan YME memiliki sebuah danau yang sangat indah panoramanya dan dikelilingi perbukitan serta tanah yang subur sebagai sentra-sentra pertanian dan perkebunan. Danau Toba sebagai salah satu kekayaan alam wajib disyukuri keberadaannya dan semestinya harus dikelola secara maksimal, sehingga adanya danau toba memiliki multi manfaat bagi masyarakat Sumut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri sebenarnya memang telah menetapkan kawasan danau Toba sebagai sebuah kawasan strategis, khususnya sebagai destinasi wisata unggulan daerah, dan juga pusat konservasi lingkungan. Data kunjungan wisatawan ke Danau Toba menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan 105.000 jiwa menjadi 131.000 jiwa hingga akhir tahun 2014 dimana jumlah tersebut masih didominasi wisatawan domestik termasuk sedikit wisatawan mancanegara, dengan destinasi utama adalah Kabupaten Samosir.

Jika dilihat dari potensi keindahan alam, kekayaan kultur adat istiadat dan juga berbagai layanan wisata yang tersedia sebenarnya pengelolaan wisata danau toba dapat dikatakan belum optimal. Untuk itulah perlu keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam membenahi semua aspek pendukung pengembangan wisata Danau Toba untuk dapat menjadi destinasi wisata tingkat Dunia.

B. DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan 10 (sepuluh) destinasi Wisata Nasional yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai, harus dapat menjadi andalan wisatawan Indonesia yang berkelas

dunia. Pemerintah pusat juga membentuk Badan Pengelola Kawasan Danau Toba agar manajemen pengelolaan kawasan lebih efektif dan efisien.

Hal ini tentunya suatu kejutan besar bagi masyarakat Sumatera Utara, karena memang dirasakan beberapa tahun belakangan ini danau Toba mengalami kemunduran dalam hal jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata asing. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pelayanan wisata itu sendiri, infrastruktur wisata yang belum memadai, dan dukungan pemerintah pusat yang kurang maksimal, sementara pemerintah daerah juga tidak dapat berbuat banyak karena masih kekurangan dana pembangunan untuk berbagai sektor kehidupan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Program percepatan pembangunan destinasi Pariwisata Danau Toba dengan proyeksi pembangunan infrastruktur dengan anggaran sekitar Rp. 21 Triliun akan di gelontorkan oleh Pemerintah Pusat secara bertahap. Kementrian pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1.000.000 kunjungan pada tahun 2019. Tentunya target yang dibuat oleh Pemerintah pusat harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten yang ada disekitar Danau Toba, serta masyarakat Sumatera Utara secara umum.

Pemerintah pusat menyiapkan Bandara Silangit sejak tahun lalu untuk menjadi bandara internasional. Rencananya, landasan pacu bandara akan diperpanjang menjadi 2.650 meter dan lebarnya 40 meter, perbaikan gedung terminal penumpang, dan sebagai langkah awal telah pula dibukanya rute penerbangan dari Jakarta langsung ke bandara Silangit di Tapanuli Utara mulai 23 Maret 2016 dengan frekuensi terbang tiga kali sepekan. Hal ini setidaknya diharapkan mampu mendorong jumlah kunjungan, karena selama ini persoalan akses transportasi sering menjadi keluhan wisatawan ketika ingin berkunjung ke danau Toba. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan Tol Medan–Tebing pasti sangat membantu percepatan jarak tempuh Medan-Siantar -Parapat bagi wisatawan domestik yang ingin datang ke danau Toba.

Pembangunan jalan lingkar Samosir, peningkatan jalan Silangit-Balige-Parapat, dan pelebaran jembatan Pangururan - Tele, semuanya bermuara pada peningkatan akses infrastruktur. Salah satu

yang terpenting juga adalah peremajaan feri dari Ajibata-Tomok, dan Tigaras-Simanindo, serta perlu juga difikirkan feri pesiar dari balige ke sekitar wilayah danau toba lainnya. Keseriusan pemerintah pusat dalam memajukan pariwisata di Danau Toba Provinsi Sumatera Utara tentunya harus didukung Pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat sebagai ujung tombak pelaksana pariwisata tersebut, sehingga diharapkan keberhasilan program pemerintah pusat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, bahkan sebentar lagi pemerintah Pusat akan menerbitkan Keputusan Presiden tentang Badan Pengelolaan Kawasan Danau Toba.

C. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bulan April s/d Juni setiap tahunnya seperti bulan Mei saat ini, Pemerintah daerah baik Pemprovsum maupun 33 pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sumut selalu disibukkan dengan jadwal Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan rencana pembangunan dan anggaran tahun depan.

Sebenarnya inilah suatu momentum tepat bagi pemerintah kabupaten yang ada di sekitar wilayah danau toba untuk secara serius, menyusun rencana kerja dan proyeksi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas layanan wisata di daerahnya masing-masing. Para Bupati harus jeli, kreatif dan memiliki visi yang jauh kedepan dalam mendukung program pemerintah pusat dari berbagai aspek potensi daerah yang dimiliki.

Sebaiknya para Bupati tidak hanya menunggu bola yang datang, tapi harus lebih serius mengkaji, meneliti, mengajak semua pihak, membangun kemitraan strategis, menyusun program, kebijakan, kegiatan dan rencana aksi yang lebih detil agar pemanfaatan anggaran APBD benar-benar sesuai dengan target pengembangan wisata danau toba. Jika merujuk pada data APBD pada 7 (tujuh) Kabupaten dikawasan Danau Toba sebenarnya secara makro cukup besar jumlahnya sebagaimana pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. APBD Tahun 2016 Kab.Sekitar Danau Toba

No	Kabupaten	Jumlah APBD (Rp)
1	Karo	1.712.767.793.153
2	Samosir	849.264.142.360
3	Toba Samosir	997.808.607.417
4	Tapanuli Utara	1.239.318.179.053,
5	Humbang Hasundutan	935.772.157.893
6	Dairi	1.110.132.640.000
7	Simalungun	2.433.366.211.000
	Total	4.518.331.494.002

Sumber : APBD Kab/Kota (2016)

Kemudian secara khusus, APBD Sumut tahun 2016 adalah sebesar Rp 9,004.403.490.630 dan alokasi untuk dinas pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencapai Rp 50 miliar, serta anggaran yang diproyeksikan senilai Rp 3 miliar dalam APBD untuk mendukung penyelenggaraan Festival Danau Toba 2016.

Memang keseluruhan APBD tersebut diatas bukanlah hanya untuk sektor pariwisata saja akan tetapi diperuntukkan mencakup seluruh pembiayaan pembangunan daerah baik belanja aparatur maupun belanja publik, sehingga pemerintah pada 7 (tujuh) Kabupaten harus menentukan skala prioritas pembangunan dengan keterbatasan dana yang ada.

Namun setidaknya dalam merumuskan prioritas kegiatan pada musrenbang untuk anggaran tahun 2017 tahun depan, pemerintah pada 7 (tujuh) Kabupaten yang ada disekitar danau Toba harus menetapkan suatu kegiatan yang unggulan yang benar benar dapat mendukung kemajuan Danau Toba. Sebagai contoh Kabupaten Samosir tahun 2016 secara khusus pada dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Disparsenibud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,385 miliar, ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen pemkab Samosir dalam peningkatan layanan pariwisata di daerah tersebut, karena memang data menunjukkan destinasi utama para wisatawan adalah di Samosir. Seharusnya ditahun 2017, Pemkab Samosir dapat meningkatkan anggaran pada dinas tersebut dan tentunya dengan target dan sasaran yang jelas dan terukur.

D. DUKUNGAN PELAKU USAHA

Pelaku usaha tentunya menyambut baik program kerja dan aksi nyata Pemerintah dalam membangkitkan pariwisata danau Toba. Respon cepat diawali oleh ikutnya maskapai penerbangan Sriwijaya air membuka rute penerbangan Jakarta Silangit sejak 26 April 2016. Kemudian para investor dibidang perhotelan juga sudah menjajaki pembangunan hotel baru dan berdasarkan informasi dari kalangan pengusaha sekarang ini sedang dalam tahapan survey untuk studi kelayakan.

Tentunya pelaku usaha harus mendukung kebijakan pemerintah dan sebaliknya pemerintah juga harus mendukung kemudahan khususnya perizinan bagi para pelaku usaha. Sektor-sektor usaha yang sudah ada dapat dibenahi dan sektor-sektor usaha baru harus terus ditumbuh kembangkan agar daya dukung pelaku usaha benar-benar kuat dalam pengembangan danau toba sebagai destinasi wisata dunia.

Mungkin hal yang paling mendasar adalah kualitas layanan yang harus di standarisasi, kemudian promosi yang gencar, diversifikasi produk, penguatan kapasitas pelaku wisata melalui berbagai asosiasi pengusaha, dan juga pendekatan kultural bagi masyarakat dalam menyambut datangnya wisatawan domestik maupun asing.

E. PENUTUP

Jika pemerintah pusat sudah serius dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan pembentukan Badan Pengelola kawasan, kemudian pemerintah provinsi Sumut mendukung dari sisi kebijakan anggaran untuk promosi wisata, pemerintah Kabupaten khususnya 7 (tujuh) daerah yang ada disekitar danau toba juga melaksanakan program kerja dan aksi nyata yang lebih kongkrit dan aplikatif, serta dukungan pelaku usaha dan masyarakat secara bahu membahu bersatu padu membangun danau toba maka diyakini dalam waktu dekat danau toba kembali bangkit dan dapat benar-benar menjadi andalan Sumut sebagai destinasi wisata tingkat dunia. Artinya masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, media massa, tokoh adat, pemuda, dan semua pihak terkait lainnya diharapkan terlibat penuh memikirkan dan berbuat untuk kemajuan kawasan danau Toba. Semoga.

5. SENSUS EKONOMI 2016 : CERMIN PEREKONOMIAN KITA

A. PENGANTAR

Sensus Ekonomi 2016 (SE) adalah suatu kegiatan pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam kurun waktu setiap sepuluh tahun sekali. Sensus yang dilaksanakan oleh BPS didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana BPS harus melaksanakan tiga sensus, yakni Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi dan Sensus Pertanian. Secara teoritis akademik, perlu dipahami bahwa metodologi sensus berbeda dengan metodologi survey, karena sensus dilakukan kepada semua target populasi, sehingga konsekuensi logisnya adalah kegiatan sensus ekonomi harus komprehensif dilakukan sejak pencacahan, pengumpulan/pengambilan data dilapangan, validasi, tabulasi hingga penyajian data yang berkenaan dengan seluruh aktifitas ekonomi masyarakat, baik secara individu, kelompok maupun badan usaha.

Ini merupakan tugas berat sekaligus misi mulia BPS dalam rangka pemutakhiran data, fakta dan informasi sebagai suatu cerminan kondisi perekonomian Indonesia. Untuk itulah melalui tulisan ini penulis berusaha memberikan informasi kepada masyarakat agar mau mendukung dan mensukseskan SE 2016, agar BPS dapat segera menuntaskan tugas besar ini guna kemutakhiran data ekonomi bangsa sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan yang sudah tentu pasti bermanfaat juga bagi masyarakat.

B. RUANG LINGKUP SE 2016

Secara resmi SE dilaksanakan selama sebulan penuh sejak tanggal 1 s/d 31 Mei 2016 yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian, karena sektor ini memiliki kegiatan sensus sendiri dan telah terlaksana pada tahun 2013 yang lalu. Jika kita membaca pada website resmi BPS pada laman www.bps.go.id sangat jelas dirinci bahwa tujuan SE 2016 adalah untuk mewujudkan data

ekonomi nasional yang akurat, terkini, dan terpercaya. Metode Pendataan SE 2016 meliputi: Metode listing usaha/Perusahaan (Pencacahan dilakukan di seluruh wilayah NKRI, mencakup seluruh usaha ekonomi). Metode Pendataan karakteristik Usaha Mikro (Pencacahan dilakukan secara sampel berdasarkan frame hasil listing SE 2016), dan Metode Pendataan karakteristik Usaha Menengah Besar (Dilakukan secara sensus untuk Seluruh usaha/perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar).

Cakupan SE2016: Seluruh usaha/perusahaan non pertanian yang meliputi: Di lokasi tetap/permanen (mall, kantor, pasar, dll), Di lokasi tidak tetap (kaki lima, pasar kaget, dll), Usaha keliling, Di rumah tangga (warung). Kegiatan juga dilaksanakan pada pelaku usaha, Pemerintah (sekolah, rumah sakit), Lembaga nonprofit (tempat ibadah, organisasi sosial), Korporasi (perusahaan, restoran, supermarket, hotel), Di rumah tangga (online, sektor nonformal). Jadi bagi masyarakat pelaku ekonomi, wajiblah memberikan data tentang kegiatan usaha dan perekonomian yang dilaksanakan agar petugas lapangan dari BPS Kab/Kota yang terjun ditengah-tengah masyarakat dapat menyelesaikan tugasnya dengan mudah dan cepat. Sensus Ekonomi juga berperan dalam mengidentifikasi populasi, memperbaharui direktori dan sampling frame serta penyebaran usaha di Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1997.

Pendekatan SE06 dilakukan melalui pendekatan usaha, baik yang berskala besar ataupun berskala kecil , termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Kegiatan pendaftaran perusahaan/usaha merupakan awal rangkaian yang sangat penting dalam pelaksanaan SE06. Dari hasil Listing diharapkan dapat diperoleh gambaran populasi kegiatan ekonomi pada setiap level. Hasil kegiatan SE 2016 akan mejadi pondasi bagi pengukuran kegiatan usaha di Indonesia, dan akan menghasilkan beberapa informasi sebagai berikut :

Tabel 2. Informasi seputar Sensus Ekonomi

1.	Pemetaan potensi (level) ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha
2.	Benchmarking PDB/PDRB, ketenagakerjaan, dan lain-lain
3.	Tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survei bidang ekonomi (Survei Harga, Survei Produksi, Survei Distribusi, Survei Jasa, Survei Khusus/adhoc, dsb)
4.	Terbangunnya basis data dan benchmark Updating Integrated Business Register (IBR)

5.	Karakteristik usaha menurut skala usaha
6.	Karakteristik usaha (unik): franchise, e-commerce/online business, multilevel marketing, dll.
7.	Pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah
8.	Tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia

Sumber : www.bps.go.id (2016)

C. WUJUDKAN MASYARAKAT SADAR SENSUS

Satu hal yang sering salah pengertian dimasyarakat sensus ekonomi diartikan sebagai pendataan potensi pajak, padahal sebenarnya ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Sistem perpajakan kita menganut Sistem *Self-assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam system ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan self assesment agar menjadi masyarakat yang sadar pajak, selain itu system self assesment akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadapnya. Sedangkan sensus ekonomi mencakup seluruh aktifitas kegiatan ekonomi yang mungkin saja bukan sebagai objek pajak dan secara peraturan bukan barang/jasa kena pajak, jadi masyarakat tidak perlu takut dengan sensus ekonomi, Bahkan BPS RI juga menjamin kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat. Poin pentingnya adalah Kita tidak perlu khawatir, dan justru harus sadar bahwa kegiatan ini adalah dari Kita, oleh Kita dan untuk kepentingan perekonomian Kita Juga.

Dengan Sensus Ekonomi Pemerintah lebih mudah mengambil kebijakan makro perekonomian, yang tentunya akan dipedomani dan bermanfaat oleh berbagai stake holder lainnya. Bahkan Presiden Jokowi secara tegas menyatakan bahwa data BPS menjadi rujukan data pada segala aspek perencanaan pembangunan nasional.

D. SE2016 DAN KEPENTINGAN DAERAH SUMUT

Tentunya SE 2016 yang dilaksanakan oleh BPS RI beserta jajarannya pada tingkat BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah pusat saja, karena data yang diperoleh dari sensus tersebut juga akan mencerminkan kondisi

objektif perekonomian daerah khususnya pada Provinsi Sumatera Utara dan termasuk 33 Kabupaten/Kota yang ada didalamnya. Saat ini Sumut menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat yang masuk kedalam koridor II Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) atau yang sekarang diganti menjadi Komite Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Dalam agenda tersebut Sumatera Utara ditetapkan sebagai zona ekonomi utama untuk produk unggulan Kelapa Sawit dan Karet. Penguatan MP3EI didukung dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Pelabuhan Kuala Tanjung, sebagai Hub internasional Port. Kemudian juga berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang ada seperti jalan Tol Kuala Namu -Medan – Tebing, dan ruas jalan Tol Medan - Binjai, Program percepatan pembangunan destinasi Pariwisata Danau Toba dengan pembangunan infrastruktur dengan proyeksi anggaran yang relatif besar kedepannya, menjadi bagian penting dari perekonomian daerah.

Tapi untuk mengetahui dampak geliat proyek-proyek nasional yang ada di Sumut dan dampaknya pada ekonomi di masyarakat Sumut haruslah didukung oleh data dan informasi yang akurat, dan melalui SE 2016 ini akan menjawab semua data yang dibutuhkan, sehingga kita sebagai masyarakat Sumut juga harus paham bahwa SE 2016 sangat besar manfaatnya untuk dasar kebijakan perekonomian daerah Sumatera Utara.

E. PENUTUP

Dengan demikian, untuk suksesnya pelaksanaan SE 2016 marilah kita memberikan informasi kepada petugas BPS yang datang ke tempat usaha kita, agar tugas berat yang diemban BPS dapat menjadi lebih ringan dan tujuan SE 2016 dapat tercapai. Ini adalah agenda periodik 10 tahunan BPS dan kita patut bangga jika pada tahun 2016 ini menjadi salah satu bahagian yang terlibat didalamnya. Semoga.

6. GELIAT EKONOMI PON 19 DI PROVINSI JAWA BARAT

A. PENDAHULUAN

Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke 19 di Provinsi Jawa Barat yang berlangsung sejak tanggal 9-23 September 2016 resmi dibuka oleh Presiden Jokowi Sabtu, 17/09/16 di stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ajang olahraga empat tahunan nasional ini diikuti 34 Provinsi yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya Sumatera Utara yang membawa 309 orang atlet untuk 35 cabang olah raga, serta official sebanyak 93 orang yang terdiri dari Pelatih, Tim Medis, serta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut dan Kab/Kota. PON 19 kali ini mempertandingkan 44 Cabang Olah raga, dengan 756 nomor Pertandingan, dan memperebutkan sebanyak 2.492 medali.

Penulis sendiri ikut serta dalam kontingen PON Sumut dalam kapasitas pengurus bidang litbang. Saat mendarat di bandara internasional Husein Kartasasmita Bandung, sudah nampak gegap gempita kesiapan Jawa Barat khususnya Kota Bandung dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Keindahan kota Bandung demikian tertata rapi karena semua pohon yang ada dipinggir jalan di balut dengan kain hijau, kuning dan biru, tentunya spanduk, umbul-umbul PON juga menghiasi semua sudut Kota, dan baleho ukuran raksasa semuanya memuat informasi lengkap tentang agenda, lokasi dan jadwal pertandingan.

Satu hal yang paling utama menjadi perhatian Penulis dalam kegiatan ini adalah dampak ekonomi masyarakat dengan adanya event ini, karena dengan 62 tempat pertandingan/venue untuk kegiatan PON tersebar pada 13 Kabupaten/ Kota se- Jawa Barat, tentunya sebaran ini juga menjadi salah satu pendorong jalannya ekonomi Kab/Kota setidaknya dalam tiga bulan sebelum dan sesudah penyelenggaraan PON, karena penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan telah mengeluarkan dana proyek yang cukup signifikan dan menggerakkan sektor konstruksi.

Provinsi Jawa Barat saja melalui APBD nya telah menyiapkan dana sebesar Rp. 3,1 Triliun, belum lagi APBD kabupaten/Kota mendukung perbaikan infrastuktur daerahnya masing-masing sebagai lokasi pertandingan dan juga ada kucuran dana yang bersumber dari APBN lewat Kemenpora sekitar Rp. 100 Miliar.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengatakan bahwa total anggaran PON tersebut merupakan rekor tersendiri yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini. ntuk membiayai persiapan hingga penyelenggaraan PON, Pemprov Jabar melakukan penganggaran secara multiyear hingga tahun penyelenggaraan pada 2016 ini, dengan rincian, Rp 200 miliar pada APBD 2014 kemudian ditambah sebesar Rp 300 miliar pada APBD-Perubahan.

Kemudian di tahun 2015, dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun untuk menyelesaikan pembangunan venue cabang olah raga, kemudian Rp 200 miliar untuk alat-alat olah raga, dan sebesar Rp 500 miliar untuk perbaikan infrastruktur. Anggaran sebesar Rp 500 miliar tersebut dialokasikan di Dinas Binamarga untuk perbaikan jalan menuju venue. Terakhir di tahun 2016, sebesar Rp 800 miliar untuk penyelenggaraan.

Dana yang demikian besar itu Itu akan bermanfaat jangka panjang dan akan digunakan juga oleh masyarakat khususnya dalam pengembangan keolahragaan. Jabar menjadi tuan rumah PON untuk kedua kalinya setelah pada tahun 1961 menjadi tuan rumah pada PON V, dimana Kota Bandung menjadi kota utama gelaran dibantu 13 kabupaten/kota lain. Jelas masyarakat Jawa Barat mendapatkan efek ekonomi di berbagai sektor.

B. JASA PERHOTELAN DAN TRANSPORTASI

Sektor perhotelan dan transportasi yang paling terdongkrak dalam masa penyelenggaraan PON, karena layanan jasa ini adalah satu hal yang paling prinsip harus tersedia untuk melayani 9.533 orang atlet, 10.272 orang panitia pelaksana, 4.071 orang officials, dan 3.000 wartawan, belum lagi para supporter dan wisatawan yang datang sendiri dan tidak terdata jumlahnya oleh panitia PON. Namun yang Penulis rasakan selama di Jawa Barat, sangatlah mengagumkan bahwa semua panitia, para penyedia jasa perhotelan dan transportasi serta masyarakat Jawa Barat mampu memberikan pelayanan prima secara profesional dengan santun dan ramah menyambut dan

melayani semua tamu PON yang datang, sebagai bukti memang masyarakat Jawa Barat sudah mapan dan terbiasa menyelenggarakan event - event besar, baik skala nasional maupun internasional.

Saat ini tingkat hunian kamar-kamar hotel khususnya hotel berbintang penuh 100 %, karna suanya diisi penuh oleh para kontingen yang datang untuk dijadikan posko masing-masing provinsi dan juga posko cabang olahraga. Memang tingkat hunian hotel dijabar selama inipun relatif bagus, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang tahun 2015 secara keseluruhan mencapai 46,20 persen, dan pasti telah lonjakan yang cukup signifikan dengan adanya kegiatan PON ini.

C. SEKTOR UMKM

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga tidak mau kehilangan kesempatan pada event PON ini, terbukti hampir di semua tempat lokasi pertandingan PON tersedia stand untuk para pelaku UMKM yang dilibatkan oleh panitia untuk menjual produk-produk UMKM dalam berbagai jenis. Mulai souvenir khas budaya sunda yang diproduksi para pengrajin, Kuliner, makanan ringan, Berbagai varian makanan dan minuman seperti Abon Jantung Pisang, Keripik Peuyeum dan minuman yang berbahan baku Strawberi kedondong, mangga, semuanya hasil olahan pelaku UMKM, sampai cendera mata dalam berbagai produk kreatif yang berlabelkan maskot dan logo PON.

Memang UMKM merupakan salah satu sektor unggulan provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari sektor pengolahan industri kecil dan menengah. Industri pengolahan sendiri memberikan kontribusi PDRB yang mencapai 43 %, kemudian Konstruksi 8 %, Pertanian 9 %, Perdagangan 15 %, dan 25 % sektor lainnya. Data dirilis oleh BPS Jabar tahun 2015 volume ekspor non migas yang termasuk didalamnya sektor pengolahan produk UMKM Jawa Barat juga cukup signifikan mencapai USD 6,852.36 di tahun 2015.

Untuk Kota dan Kabuapten Bandung sendiri diperoleh data nilai ekspor yang dihasilkan Kabupaten Bandung pada Tahun 2014 tercatat US \$ 777.105.180,12 dengan volume sebesar 160.204.719,30. Kgm. Tahun 2015 naik menjadi US \$ 820.972.774,55 dengan volume 198.351.749,06 Kgm. Sebagian besar produk yang diekspor berupa coklat, katun, plastik, pakaian jadi, tas serta alat kesehatan yang dikirim ke Kanada, Amerika Serikat, negara ASEAN,

Korea Selatan, China, India disamping Pakistan. Tentunya produksi UMKM meningkat tajam seiring permintaan cenderamata dan juga oleh-oleh untuk dibawa pulang para Tamu PON.

D. SEKTOR PARIWISATA

Sektor lain yang juga meraup keuntungan adalah Pariwisata, banyak sekali destinasi objek-objek wisata dikunjungi para tamu PON khususnya atlet dan official yang sudah selesai bertanding. Sektor ini sangat berdampak langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi objek wisata karena ramainya jumlah pengunjung hingga ribuan orang sehingga pendapatan masyarakat pun mengalami kenaikan drastis. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jawa Barat merupakan salah satu barometer keberhasilan pariwisata Jawa Barat terutama ketertarikan turis asing untuk berkunjung. Tahun 2015 tercatat wisman yang datang langsung ke Jawa Barat melalui Bandara Hussein Sastranegara di Kota Bandung dan pelabuhan Muarajati di Kota Cirebon sebanyak 159.035 orang.

Keberhasilan promosi pariwisata sangat menentukan peningkatan minat destinasi wisata ke Jawa Barat. Sementara wisatawan nusantara, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wisatawan ini perlu diikuti dengan peningkatan penyediaan kamar hotel maupun akomodasi lainnya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran atas kamar atau akomodasi tersebut.

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Jawa barat berhasil memanfaatkan momentum PON untuk meraih keuntungan ekonomi daerahnya, ini juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah yang bekerja keras bahu membahu untuk suksesnya PON ini. Tekad mereka adalah jadi Juara umum di rumah sendiri dengan slogan berjaya di tanah legenda, Jabar Kahiji. Nampaknya cita-cita itu bisa terwujud karena memang peringkat perolehan Medali sampai saat ini masih dipimpin oleh Jabar.

E. BAGAIMANA DENGAN SUMUT ?

Keinginan Sumut menjadi tuan rumah PON sejak PON ke tiga tahun 1958, belum juga terwujud. Pemprovsu dibawah kepemimpinan Gubsu juga Ketua DPRDSU harus mampu menyampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Presiden RI untuk diteruskan kepada KONI Pusat dan PB PON agar pada PON ke 21 tahun 2024 mendatang

Sumut dipercaya menjadi Tuan Rumah setelah PON ke 20 tahun 2020 yang diselenggarakan di Papua.

Paling minimal adalah Sumut bisa menjadi tuan rumah bersama penyelenggara dengan Provinsi Aceh, seperti yang pernah digagas beberapa waktu yang lalu. Menjadi tuan rumah PON merupakan suatu langkah terobosan dan percepatan peningkatan prestasi olahraga, hal ini penting karena sebagai penyelenggara PON tentunya daerah akan mendapatkan kesempatan pembangunan prasarana/Venue olah raga yang berstandar internasional sehingga sangat membantu pembinaan atlet yang berkelanjutan.

Kondisi ini sudah dialami oleh Provinsi Jatim, Kaltim, Sumsel, Riau, sekarang Jabar dan sebentar lagi Papua. Paling penting adalah geliat ekonomi dapat dirasakan Sumut jika menjadi Tuan rumah PON seperti apa yang dinikmati oleh Jabar di tahun 2016 ini.

7. WACANA KEBIJAKAN FULLDAY SCHOOL

A. PENGANTAR

Sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa setiap pergantian Menteri akan berganti kebijakan, yang secara operasional tentunya berdampak pula pada pergantian program dan kegiatan dilapangan. Sering kali seorang Menteri baru, takut dianggap tidak bekerja jika tidak membuat sebuah kebijakan baru usai dilantik.

Salah satu Menteri yang di ganti pada resuffle jilid II adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Anies Baswedan tokoh pendidikan nasional yang menggagas Indonesia mengajar dan program Guru Pembelajar. Saat menjadi Mendikbud, Anies Baswedan membuat kebijakan memberhentikan Kurikulum 2013 (K13) yang sebenarnya belum berjalan secara total.

Sekarang Mendikbud Muhadjir Effendy membuat wacana baru yaitu penerapan model sekolah sehari penuh (*full day school*). Wacana ini terus menjadi perbincangan hangat dan di bahas para stakeholder pendidikan di sekolah-sekolah, dan wacana ini juga telah menjawab dugaan masyarakat bahwa setiap pergantian Menteri akan ada pergantian kebijakan. Walaupun terakhir Muhadjir Effendy membatalkan niatannya tentang *fullday school*, setelah derasnya arus pro dan kontra di lapangan. Untuk mencermati fenomena ganti menteri dan ganti kebijakan yang telah menjadi tradisi di Indonesia, maka tulisan ini akan mengulas bagaimana seharusnya sebuah kebijakan dilahirkan agar publik dapat mengetahui dan para pengambil kebijakan khususnya pemerintah pusat dapat memperhatikan aspirasi masyarakat melalui kolom opini ini.

B. ASPEK KEBIJAKAN PUBLIK

Sebenarnya dalam suatu konsep kebijakan publik, pemerintah harus memperhatikan dan menganalisis sedikitnya 5 (lima) aspek dalam merumuskan suatu kebijakan, yaitu (1) Aspek filosofis, (2) Aspek sosiologis, (3) Aspek Teknis, (4) Aspek yuridis dan (5) aspek Finansial. Kelima aspek ini sebenarnya harus menjadi pedoman dasar analisis suatu kebijakan sebelum ditetapkan, sehingga suatu kebijakan

tidak terlalu mudah untuk diganti-ganti. Adapun yang dimaksud Aspek filosofis yaitu menjelaskan konsep dan kerangka berpikir keilmuan sebagai dasar suatu kebijakan, Aspek sosiologis menjelaskan tentang suasana sosial masyarakat dalam penerapan kebijakan, aspek teknis adalah apakah kebijakan tersebut benar dapat diterapkan dilapangan, aspek yuridis apakah kebijakan tersebut memiliki payung hukum dan tidak bertentangan dengan payung hukum yang lebih tinggi, dan terakhir aspek keuangan yaitu apakah kebijakan tersebut didukung ketersediaan anggaran.

Contoh kasus, adalah wacana tentang kebijakan fullday school yang digagas Mendikbud, tentunya dapat dianalisis dari kelima aspek tersebut. Sebenarnya dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional jelas dinyatakan bahwa pendidikan Indonesia bertujuan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar memperoleh pendidikan yang layak dan pengembangan diri serta meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Artinya wacana fullday school harus diterapkan untuk seluruh Indonesia yang memiliki konsekuensi logis harus melalui analisis terhadap kelima aspek analisis kebijakan.

Menurut Mendikbud, jika full day diterapkan para siswa lebih banyak waktu di sekolah untuk dibina dan dibangun karakternya, apalagi bagi para siswa yang telah pulang sekolah padahal dirumah orangtuanya belum pulang bekerja. Alasan tersebut sah-sah saja, tapi sebenarnya secara kajian Aspek filosofis pendidikan dan banyak hasil penelitian menggambarkan bahwa yang mempengaruhi pembentukan karakter siswa adalah bukan hanya soal waktu lama atau tidaknya siswa berada di sekolah, tapi soal proses belajar, keteladanan guru dan efektifitas belajar siswa di sekolah.

Seberapa efektifkah sekolah membentuk karakter siswa tergantung pada kepemimpinan Kepala sekolahnya, Kurikulumnya, Gurunya, Peran orang tua siswa lewat komite sekolah, sarana prasarana sekolah, dan budaya sekolah, jadi faktor waktu bukanlah segala-galanya. Apalagi kemajuan dibidang teknologi pendidikan yang saat ini sudah menerapkan e-learning, e-book, waktu belajar menjadi sangat tidak terbatas karena siswa bisa belajar online dengan mengakses sumber belajar 24 jam.

Sebenarnya Kurikulum 2013 (K13) yang digagas Rektor Unimed Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd sewaktu menjabat kepala Badan Pengembangan SDM Kemendiknas sudah cukup menjawab bagaimana pembentukan karakter siswa melalui kurikulum tematik

dengan memperkuat aspek sikap, perilaku dan pengetahuan siswa, sayangnya kurikulum ini berhenti pula karena faktor kultur organisasi dimana ganti setiap ganti Menteri selalu ganti kebijakan.

Kemudian secara aspek sosiologis, apakah sudah siap masyarakat Indonesia menerima model sekolah ini, bagaimana dengan kondisi anak-anak yang sepulang sekolah harus membantu orang tuanya berjualan, bekerja di sawah, menggembala hewan ternak, memancing di danau membantu ekonomi keluarga, atau setidaknya menjaga adiknya yang masih balita di rumah sepulang sekolah. Belum lagi kondisi geografis pedalaman daerah-daerah yang tidak ada transportasi publiknya, siswa harus naik sampan, harus menyeberang sungai, harus menumpang truk pengangkut sawit, atau tumpangan lainnya ketika pulang sekolah yang ada pada jam-jam tertentu saja.

Aspek teknis, yaitu bagaimana penerapan dilapangan, apakah kebijakan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dapatkah ini diterapkan seragam dan simultan pada 206.000,- unit sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dapatkah langsung dipahami oleh 6 juta guru yang ada di seluruh Indonesia? Bagaimana pengawasannya? Bagaimana sistemnya?.

Selanjutnya Aspek yuridis harus pula diterbitkan regulasi payung hukumnya, diuji materi lagi di Mahkamah Konstitusi apakah bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi, dan konsekuensi hukum yang ada dalam regulasi tersebut. Terakhir aspek finansial, harus didukung pula dengan anggarannya, menambah beban APBN lagi, menambah hutang Pemerintah lagi, yang tentunya menjadi beban rakyat Indonesia lagi.

Pastilah sebuah kebijakan seperti wacana fullday school ini akan membutuhkan dana puluhan hingga ratusan Milyar Rupiah jika akan diterapkan di Seluruh Indonesia dengan memunculkan berbagai proyek, katakanlah mulai dari dana proyek sosialisasi, proyek pelatihan kepala sekolah dan gurunya, proyek penyusunan pedoman juklak dan juknisnya, proyek uji cobanya, proyek monitoring dan evaluasinya, sampai proyek riset analisis penerapannya. Semuanya berujung pada proyek.

C. ORIENTASI PUBLIK VS ORIENTASI PROYEK

Jika suatu kebijakan dianalisis secara holistik dan komprehensif, dengan memperhatikan evaluasi atas kebijakan Menteri sebelumnya dan dikaji melalui kelima aspek tersebut diatas, setidaknya kebijakan baru akan lebih terukur dan mudah berterima di Masyarakat. Namun pemaksaan kebijakan oleh Pejabat baru hanya karena kepentingan popularitas dan pencitraan cenderung akan mendapat penolakan publik, karena tidak berdasarkan kondisi objektif dilapangan.

Wajarlah kalau publik menduga bahwa sebenarnya kebijakan publik bukan berorientasi pada kepentingan publik (*Public Interest*) akan tetapi bisa saja sebatas pad kepentingan proyek (*Project interest*). Fakta membuktikan banyak sekali kebijakan yang sudah ditetapkan oleh sebuah Kementerian, kemudian direvisi bahkan diganti lagi dalam waktu singkat ketika Menterinya di ganti. Tentunya melalui kolom opini ini, masyarakat berharap Pemerintah Pusat khususnya Kementerian dan para pejabat tinggi di republik tercinta ini dapatlah mengkaji suatu kebijakan dengan lebih arif dan menggunakan perspektif yang lebih luas untuk kepentingan publik jika ingin membuat sebuah kebijakan baru. Apalagi adaptasi kebijakan itu memerlukan proses dan waktu dalam penyesuaiannya dilapangan. Belum berjalan, sudah muncul aturan baru lagi sebagai akibat adanya kebijakan baru. Sampai kapan ini terus berlanjut, kedepan haruslah kebijakan lahir melalui kajian dan kebutuhan, bukan kemauan atau kepentingan tertentu. Semoga.

8. AUDIT PARPOL PERAN STRATEGIS AKUNTAN

A. PENDAHULUAN

Pesta Demokrasi di Indonesia sudah diambang pintu dan berbagai persiapan jauh-jauh hari telah dilakukan oleh elemen-elemen yang terkait dengan even ini. Slogan yang dikumandangkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan propaganda "Pemilu 2004 beda, bisa pilih langsung" adalah sebuah slogan yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi jika diinterpretasikan dalam berbagai sudut pandang akan memiliki makna substansial yang beragam tergantung pada perspektif dan kontekstual penafsiran istilah tersebut.

Bagi Para pengamat politik istilah diatas mungkin dapat diartikan bahwa Pemilu kali ini akan lebih baik dan berbeda dari Pemilu sebelumnya, karena masyarakat dapat mengetahui dan memilih secara langsung caleg yang akan duduk di legislatif.

Penulis sendiri menggaris bawahi kalimat Pemilu 2019 beda dari sudut pandang profesiakuntan dan disiplin keilmuan akuntansi, dimana hal yang paling diharapkan untuk berbeda adalah kepentingan transparansi keuangan kontestan Pemilu sangat urgen karena dalam perspektif akuntansi prestasi suatu organisasi diukur dan dapat dilihat dari sistem pertanggungjawaban (Accountability) dimana peran informasi keuangan sebagai salah satu indicator pengukuran kinerja harus diimplementasikan dengan cermat, akurat dan tepat waktu.

Secara khusus tulisan ini akan membahas strategis profesi akuntan dalam rangka mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan parpol dengan isu utama audit parpol.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK

Pengelolaan keuanagan public memang perlu mendapat perhatian serius karena sumberdaya yang dikelola berasal dari masyarakat (dana publik). Berbeda dengan organisasi privat seperti perusahaan yang mengelola dana pemilih modal maka tanggung jawab pengelolaan dana tersebut berorientasi kepada pemilik modal

(Owners) Tentunya karakteristik organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit. Jelas berbeda dengan organisasi non profit. Perbedaan pengelolaan dana tersebut juga berimplikasi kepada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi.

Disiplin ilmu akuntansi sebagai sebuah instrument dan sistem informasi keuangan juga berkembang dengan mengikuti dua karakteristik organisasi tersebut. Bagi sector swasta (private sector) akuntansi yang berlaku adalah akuntansi sector swasta dengan cakupan berbagai cabang akuntansi. Seperti akuntansi keuangan (Financial Accounting) dan akuntansi biaya (Cost Accounting) dan akuntansi manajemen (Management Accounting) sedangkan bagi organisasi public yang berlaku akuntansi sector publik (Public sector Accounting).

Perbedaan mendasar dari kedua akuntansi ini pada pelaporan yang didasarkan aktivitas organisasi. Organisasi perusahaan aktivitasnya adalah mengelola sumber daya ekonomis dengan tujuan utama menghasilkan laba (Profit motif), sedangkan organisasi publik (seperti Institusi pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan) tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan dan pencapaian tujuan bersama anggota organisasi. Sehingga sangat jelas dapat dipahami bahwa organisasi publik termasuk kategori organisasi yang bersifat nirlaba (non profit motif)

Salah satu bentuk non profit di Indonesia yang saat ini banyak mendapat sorotan bagi publik adalah organisasi partai politik, sebab masyarakat berharap organisasi partai politik dapat mewujudkan berbagai keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara dengan memilih orang-orang parpol untuk menjadi wakil-wakil rakyat (badan legislatif) yang diamanatkan mengangkat para pengelola negara (eksekutif).

Walaupun pada kenyataannya harapan itu masih sangat jauh tetapi menurut penulis hanya masalah waktu pendewasaan dalam koridor iklim demokrasi dan demokratisasi yang baru aja dimulai. Dengan demikian momentum Pemilu 2004 harus dijadikan garis start oleh para parpol beserta Pemilu dalam hal akuntabilitas keuangan kepada masyarakat, mengingat parpol sebagai salah bentuk organisasi publik akan senantiasa mendapat penilaian kinerja organisasi oleh publik atas segala hal yang telah dicapai dan dibuktikan secara kongkrit. Jika akuntabilitas keuangan publik ini benar-benar dapat diraktikkan oleh parpol, maka kedepan akan lahir

parpol-parpol modern dengan manajemen terbuka (open management), transparan, professional dan mandiri sebagai sebuah parpol ideal yang didambakan masyarakat.

Peran strategis Profesi Akuntan , sebagai salah satu elemen masyarakat, profesi akuntan memiliki peran strategis untu turun aktif menyukseskan Pemilu 2004. Memang suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2004 dapat dilihat dari banyak aspek, antara lain penyelenggaraan kampanye secara damai, kecurangan kontestan dapat dihindarkan, terelisasinya pemungutan suara yang demokratis, besarnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara , sehingga proses perhitungan suara yang cepat dan akurat.

Akan tetapi kembali penulis menggarisbawahi bahwa dalam perspektif akuntansi, penyampaian laporan keuangan parpol kepada publik juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, sebab parpol yang menang karna dukungan dana besar tetapi tidak tidak berupaya menjelaskan sumber-sumber pendanaan organisasinya kepada publik dapat menimbulkan pertanyaan yang besar pula.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik tentunya harus didukung oleh sistem penyusunan dan pelaporan keuangan. Sistem akuntansi yang ada disini sudah memungkinkan untuk itu dengan berkembangnya berbagai sistem akuntansi berbasis computer. Menurut Borhar dan Hopwood (1995) pergeseran pengelolaan keuangan dan pelaporan akuntansi dari sistem manual kepada sistem komputerisasi memberikan kontribusi yang sangat besar dan pesat dalapm penciptaan informasi keuangan karena laporan yang dihasilkan lebih tepat waktu, akurat dan dapat mudah ditelusuri sehingga memnuhi prinsip traparansi dan akuntabilitas keuangan.

Dalam rangka mendukung terciptanya transparansi pengelolaan keuangan partai poitik maka peran profesi akuntan menjadi sangat urgen dikedepankan. Perkembangan teknologi computer memudahkan manajemen parpol menyusun laporan keuangan berbasis teknologi computer. Bahkan laporan keuangan bisa on line mulai dari pengurus pimpinan sampai pimpinan anak ranting ditingkat desa dan kelurahaan.

Mungkin masalah utama adalah investasi dan sumberdaya manusia, untuk itu profesi akuntan mealui Ikatan Akuntan Indonesia

harus menyikapi masalah ini dan dapat menawarkan berbagai solusi, antara lain seperti membentuk komite-komite pengarah dan penyusunan program-program guna perancangan modul-modul dan proyek anggaran pelatihan penyusunan laporan keuangan parpol mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Tetapi mengingat pelaksanaan Pemilu sudah sangat dekat sekali, maka program-program diatas mungkin dapat dijadikan jangka panjang untuk pemilu-pemilu berikutnya. Paling kepentingan untuk Pemilu 2004 ini adalah peran strategis profesi akuntan melaksanakan audit parpol secara objektif dan independen jika ingin dianggap sebagai salah satu elemen masyarakat yang turut mensukseskan Pemilu 2004.

Audit Parpol Organisasi partai politik dituntut oleh masyarakat untuk dapat transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya bahkan, berdasarkan Undang-undang No.31 Tahun 2002 dan Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Partai Politik diatur bahwa setiap partai politik wajib membuat laporan keuangan secara berkala dan membuat lamporan dana kampanye Pemilu yang diaudit akuntan publik.

Menurut Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), audit laporan keuangan oleh akuntan publik yang wajib dipenuhi semua parpol hingga saat ini belum dianggap serius dan dikhawatirkan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika bersifat pasif audit parpol hanya sekedar legalitas formal tentang dilaksanakannya akuntabilitas keuangan parpol kepada publik lebih jauh Ahmadi Hadibroto (2006) mengingatkan audit laporan keuangan dan laporan kampanye parpol hanya dapat dilakukan jika penyusunan laporan-laporan tersebut memenuhi berbagai persyaratan. Idealnya semua pemasukan, termasuk natura beserta pengeluarannya harus di dokumentasikan sesuai prinsip akuntabilitas.

Mengingat organisasi partai politik adalah organisasi nirlaba (non profit) maka penyusunan laporan keuangan parpol dapat mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.25 yang telah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia. Dengan mengacu pada PSAK No.45 maka parpol bisa menyiapkan laporannya sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan, sehingga laporan keuangan yang disampaikan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Berdasarkan standar tersebut maka

akuntan publik dapat melaksanakan audit laporan keuangan partai politik.

Timbul pertanyaan apakah audit ini merupakan suatu proses investigasi yang ingin menjelaskan secara khusus tentang sumber-sumber dana, pengeluaran, dan penyelewengan dana sebuah partai politik ? jawabannya tentu tidak demikian, sebab audit yang dilakukan oleh profesi akuntan lebih berorientasi pada kewajaran laporan keuangan yang disajikan dengan mengeluarkan opini akuntan, selanjutnya masyarakat lah yang menilai apakah parpoltersebut mengelola dana-dana publik dengan baik dan procedural sesuai prinsip transparansi dan akutabilitas.

Saat ini organisasi IAI telah melakukan kordinasi dengan KPU pusat untuk menetapkan standar-standar audit untuk parpol. Jika penyusunan standartersebut diserahkan sepenuhnya kepada IAI maka audit parpol dapat terwujud dengan baik karena IAI sendiri memiliki Dewan Standar (Standar Setting) yang dapat memformulasikan berbagai pedoman sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Tetapi masalah ini tidak dapat pula dilepaskan dari aspek politik dan kewenangan yang ada pada KPU sebagai regulator body yang memiliki otoritas tentang segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Namun apapun masalah nya dan bagaimanapun format standar auditnya bagi masyarakat hal yang terpenting adalah audit parpol ini benar-benar terlaksana dengan baik dari hasil audit tersebut dapat pula dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Masyarakat membaca dan memperhatikan dengan seksama dari hasil audit parpol tersebut padahal tidak transparan dalam pengelolaannya.

Secara teknik memang sulit ditelusuri keuangan parpol karena sumber-sumber keuangan parpol memiliki alur yang terbuka mulai dari iuran anggota, sumbangan pengurus, donator, badan usaha parpol serta sumber-sumber yang sah. Tetapi substansi utama yang akan dilihat apakah parpol telah professional mengelola keuangannya dengan efisien dan efektif.

Bagaimanakah sumber-sumber keuangan tersebut ? apakah benar-benar sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ?kemana sajkah uang-uang tersebut digunakan? Apakah tidak menyalahi ketentuan yang ditetapkan ? banyak pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dan masyarakat pulalah akhirnya yang melakukan penilaian terhadap hasil audit tersebut.

C. PENUTUP

Penulis sendiri berpendapat bahwa bagi parpol yang benar-benar melakukan pengelolaan keuangan dengan professional dan transparan, isu audit parpol ini bukanlah menjadi masalah utama. Bahkan pengurus parpol sangat ingin kalau parpolnya dilakukan audit secara objektif dan independen guna mendapat kepercayaan dan simpatik khususnya dari pada pendukungnya dan masyarakat secara umum. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai audit yang dilakukan hanya bersifat untuk memenuhi aspek formal semata, dan disinilah integritas dan reputasi profesi akuntan dipertaruhkan turun menyaksikan Pemilu 2019. Semoga hal ini dapat terwujud ..

9. PENTINGNYA AKUNTANSI MESJID

A. PENDAHULUAN

Mesjid adalah salah satu institusi dan wadah yang dibangun sebagai sarana bagi umat untuk mengingat, mensyukuri dan menyembah-Nya dengan baik. Pada Zaman Rasulullah, selain tempat ibadah masjid juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan berbagai aktifitas, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, dan juga tempat bermusyawarah mencari solusi permasalahan yang terjadi ditengah-tengah umat.

Pemanfaatan Mesjid dapat merujuk pada firman Allah berikut ini: "Bertasbillah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya didalamnya, pada waktu pagi dan petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan [dari] mendirikan sembahyang dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan (An-Nuur:36-37)

Dengan demikian masjid adalah rumah ibadah umat Islam yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik. Ibadah terpenting yang dilakukan di masjid adalah ibadah shalat 5 waktu yang merupakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam rukun islam kedua. Ibadah shalat ini akan mengantarkan manusia untuk meningkatkan ketaqwaan sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini " Dan Didirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan –perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk" (Hud :14)

Agama Islam juga telah mendorong dilakukannya shalat dengan cara berjamaah di masjid. Karena, hal itu lebih utama pahalanya, yaitu dua puluh tujuh kali lipat dari pada shalat sendirian dirumah, seperti ditegaskan oleh beberapa hadist sahih.

Masjid juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mencerdaskan orientasi dakwah, yang biasa dilakukan dalam khotbah jumat sebagai sebuah nasihat (mau'izah) mingguan yang bersifat mendidik tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin.

Ada juga pengajian-pengajian dan kuliah-kuliah yang dilakukan secara teratur setiap harian, mingguan atau dilakukan secara rutin berkenaan dengan acara hari besar islam tertentu seperti peringatan maulid , isra'mikraj, 1 (satu) muharram, penyembelihan hewan qurbanidul adha, Nuzulul Quran, MTQ, Pelepasan Jemaah Haji, bulan suci Ramadhan dan juga Aidil Fitri, sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai pusat cahaya dan petunjuk bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Berarti masjid dimiliki fungsi ganda dalam mengembangkan misi hubungan hamba kepada khaliqnya (habluminallah) dan hubungan sesama umat manusia (habluminannas).

Berbagai kegiatan lain juga sebenarnya dapat dilakukandi masjid jika merujuk apa yang dilakukan oleh Rasullullah , seperti pusat penghafalan Al-Qur'an lembaga amil zakat lembaga penengah sengketa, lembaga solidaritas serta bantuan kemanusiaan dan lembaga-lembaga kursus bagi anak-anak muda dalam berbagai ilmu bidang pengetahuan.

B. PENDANAAN MASJID

Untuk mendukung kegiatan tersebut memerlukan biaya tidak sedikit setiap bulannya. Biaya yang dikeluarkan tentu nya untuk mendanai kegiatan yang bersifat rutin yaitu mengurus masjid, memelihara dan melaksanakan kegiatan masjid maupun bersifat incidental. Sumber-sumber pendanaan masjid biasanya berasal dari hasil tabung infaq (Jum'at maupun hari besar islam), Donatur, Wakaf, lembaga-lembaga swasta maupun instansi pemerintah. Berarti dana yang terkumpul adalah dana umat dan harus dipertanggungjawabkan kepada umat.

Menurut Ayub dkk (2000) pengurus masjid harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah-masalah keuangan ini karena kalau pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan secara baik, itu pertanda pengurus masjid adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh karna itu pengurus masjid diharapkan mampu menyusun laporan penerimaan dan penggunaan keuangan. Biasanya laporan keuangan itu dibuat sekali dalam sebulan

dan sampaikan pada waktu jum'at kepada para jama'ah. Laporan keuangan memuat dua lajur yaitu hanya pemasukan dan pengeluaran uang saja. Dengan sekilas pandang laporan itu akan menjelaskan darimana saja uang itu diperoleh dan apa saja uang itu dipergunakan.

Oleh karena itu dipergunakan konsep manajemen masjid yang jelas dan perlu adanya suatu dukungan konsep akuntansi yang sesuai dengan syariat islam dalam upaya menunjang dan meningkatkan akuntabilitas baik secara ilahiyah ukhrowi kepada Allah SWT dan maupun secara duniawi kepada umat sebagai pemberi amanahnya.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik dapat menjadi salah satu pilar dalam rangka memakmurkan masjid, karena semua kegiatan dapat didukung dengan pendanaan yang dikelola secara transparan.

C. AKUNTANSI MESJID

Melihat orientasi pengelolaan keuangan masjid yang tertuju pada pengelolaan keuangan umat secara transparan, maka diperlukan pula instrument pengelolaan keuangan tersebut, dan disinilah peranan akuntansi sebagai suatu konsep yang dapat dipraktekkan di Mesjid-mesjid. Dalam konteks pengelolaan keuangan masjid kita harus melihat secara seksama dan kritis karena definisi "pemilik keuangan Masjid" sangat sensitive menyangkut dana umat .

Jika kita menilik pandangan pengelola keuangan masjid yang pada dasarnya memahami keuangan masjid sebagai Amanah, dimana dapat dipersepsikan bahwa orang-orang telah mempercayakan amanahnya adalah orang-orang yang memiliki banyak kepentingan, mereka adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumberdana kepada masjid.

Tentu saja harapan mereka pada umumnya tak tertulis dan implisit tidak berkait dengan pengembalian materi atas dana-dana mereka seperti yang umumnya terjadi organisasi-organisasi bisnis. Akan tetapi mereka memperhatikan bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut secara tepatsebagaimana dengan tuntutan dalam syari'ah.

Akuntansi sangat berperan sehingga pencatatan dan penyajian laporan keuangan masjid dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Akuntansi yang digunakan dapat merujuk pada akuntansi keuangan bagi organisasi non profit, organisasi sosial atau akuntansi

dana yang sangat sederhana. Jika memungkinkan dapat pula disusun laporan Neraca masjid yang menggambarkan asset-aset yang ada pada organisasi badan kemakmuran masjid (BKM).

D. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MASJID

Sistem informasi akuntansi masjid yang diperlukan antara lain meliputi Buku Kas, yaitu untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas rutin dalam hal pembiayaan operasional masjid antara lain seperti Honor petugas kebersihan, rekening listrik dan air, honor bilal, khatib dan imam jum'at perbaikan sarana dan prasarana masjid, serta pengeluaran-pengeluaran masjid lainnya.

Buku Tabungan Bank yaitu buku tabungan bagi masjid yang menyimpan uang kas dengan membuka rekening di Bank karena saldo kas yang relative besar. Laporan keuangan mingguan masjid, yaitu laporan yang menyajikan penerimaan, pengeluaran dan saldo kas dalam satu Minggu.

Laporan keuangan ini biasanya disampaikan kepada Jannah sebelum pelaksanaan sholat jum'at. Kemudian laporan keuangan bulanan yaitu laporan yang menyajikan penerimaan, pengeluaran dan saldo kas dalam suatu periode bulanan tertentu.

Laporan keuangan ini biasanya di sampaikan oleh Pengurus Harian dalam hal ini adalah pemegang kas Kepala Bendahara Masjid untuk disetorkan ke Bank ataupun disampaikan pada rapat Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk Tabelaris penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan, dipasang pada papan informasi keuangan masjid tersebut.

10. KONSEP PROFESIONALISME SDM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Manajemen sumberdaya Manusia (Human Resources Management) merupakan hal terpenting dalam pengelolaan organisasi modern, karena SDM tidak lagi diposisikan sebagai beban (Cost), tetapi lebih diakui sebagai sumberdaya (asset) sehingga orientasi kebudayaan SDM dalam organisasi. Peningkatan kualitas SDM dan Profesionalisme pada seluruh aspek dunia kerja dan profesi menjadi tuntutan utama dalam era globalisasi saat ini.

Berbagai kajian konseptual manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) digali guna mengembangkan pengelolaan SDM agar menjadi lebih profesional dalam bekerja maupun berpraktik menjalankan profesi tertentu.

Sudut pandang kajian konseptual tersebut jelas didominasi oleh konsep-konsep barat sebagai mainstream keilmuan, dan sangat minim sekali yang mengkaji peningkatan kualitas SDM serta konsep profesionalisme dengan sudut pandang Islam.

Untuk itu penulis berusaha menggali profesionalisme yang ada dalam Islam dengan sumber utama Al-Qur'an dan Hadist.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan membandingkan konsep Profesionalisme pada literatur-literatur barat dengan konsep profesionalisme menurut islam. Untuk itu pertama penulis mejabarkan pengertian profesionalisme yang ada dimana asal usul etimologisari kata profesionalisme adalah profesional yang bersumber dari bahasa yunani "*Prophaino*" yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa latin disebut "*Professio*". Kedua kata tersebut mengandung makna bahwa dalam menjalankan profesinya seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu yang dapat dinilai oleh masyarakat umum atas pekerjaan tertentu (Koehn,2020)

Selanjutnya secara arfiah ataupun istilah profesionalisme menurut Poerwa darminta (1995) Echols (1997) dijelaskan sebagai suatu sifat keahlian yang ditunjukkan oleh seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu.

Peter(1991) dan Turner(1991) juga melihat profesionalisme dari sudut keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang dengan mengidentifikasi profesionalisme sebagai penguasaan dibidang pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan karakteristik (*ethics*).

B. PROFESIONALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sebagai sebuah agama yang komperhensif dan secara lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, agam islam juga memiliki konsep konsep mendasar tentang profesionalisme yang secara khusus diatur sesuai penjabaran visi, misi, kewajiban, fungsi, tugas, wewenang, tanggungjawab manusia dimuka bumi ini.

Konsep tersebut dalam ajaran Islam dapat digali dari Kitab Suci Al-Qur'an dan pada kenyataannya seluruh isi Al-Qur'an tersebut sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk umat islam, tetapi dapat berlaku seccara universal sebagai wujud manifestasi Islam Rahmatanililamin.

Khusus tentang profesionalisme, islam memandang dan menggariskan lebih lengkap dan sempurna, karna factor yang membentuk profesionalisme menurut pandangan islam adalah (1) konsep amanah ,(2) konsep ibadah.

Konsep profesionalisme yang didasarkan pada amanah artinya bahwa seseorang yang ingin bekerja, berkarya, berprestasi dan menekuni profesi apapun harus mengingat hakekat dirinya sebagai khalifah penerima amanah dari allah SWT.

Hal ini telah digariskan dalam Al-qur'an yang berbunyi sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi (Qs 2:30) kemudian pada ayat yang lain allah berfirman " sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah kami keputusan (perkara) diantara manusia adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia menyestakan kamu dari jalan allah (Qs 38:26) firman allah berikutnya "ialah yang menjadikan kami khalifah-khalifah dimuka bumi (Qs 35:39).

Dengan demikian ini berarti bahwa sebagai khalifah manusia harus berpijak pada kesadaran diri (self concicusnes) bahwa manusia sebenarnya adalah penguasa/ wakil/ pemimpin/ penjaga amanah, yang menyadari bahwa sebagai seorang penguasa/wakil/pemimpin/penja

ga amanah harus tulus,ikhlas, dan bersungguh-sungguh menjaga am
anah, menjadi wakil mengembang misi kepemimpinannya, sehingga s
etiap manusia yang bekerja dapat mewujudkan dan menjalankan pek
erjaannya dengan baik karena didasarkan dengan sikap bersungguh-
sungguh dan ikhlas.

Selanjutnya konsep profesionalisme yang didasarkan kepada p
ekerja sebagai ibadah dapat diartikan bahwa seseorang yang menjala
nkan profesinya adalah sebuah proses pengabdian semata-mata haya
ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT, karena semua aktifitas yan
g diridhoi oleh Allah SWT bernilai ibadah, secara tegas Allah SWT
berfirman.

“ Dan tidak kciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk mengab
di kepadaku” (Qs 51:56). Kemudian untuk menopang kedua konsep i
ni, seseorang harus memiliki ilmu pengetahuan yang dikuasai secara
baik dan diaplikasikan (amal) secara konsisten dalam bingkai Akhlaqul
Qarimah yang di contohkan dengan sifat-sifat Siddiq, amana, tabliq,
fatonah yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Selain dari konsep amanah dan ibadah, profesionalisme menurut
ut islam juga berpijak padaprinsip-prinsip yang telah digariskan oleh A
lQur’an dan Hadist, beberapa diantaranya dapat diuraikan berikut ini :

Prinsip ilmu, maksudnya pekerjaan itu dilakukan berdasarakan p
engetahuan sebagaimana firman allah : “ Dan janganlah kamu mengi
kuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuanmengenainya
(Qs 17:36)”

Prinsip skil (Aplikasi/amal), pekerjaan harus dilaksanakan berd
asarkan keahlian, lihat Hadist Nabi SAW: “Apabila sesuatu urusan diser
ahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya
(HR Al-Bukhori)”

Prinsip nilai out put pekerjaan harus berorientasi kepada mutu
dan hasil yang baikihat (Qs- 2:67)

Prinsip tanggung jawab (Responsibility). Keyakinan bahwa ses
uatu pekerjaan diawasi oleh allah, rasul dan umatnya sehingga harus
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai firman allah” Kata
kanlah bekerjalah kamu maka allah, rasul dan orang-orang akan meli
hat pekerjaanmu (Qs 9:105).

Prinsip etos kerja, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi digambarkan oleh sebuah Hadist sebagai orang yang tetap menaburkan benih sekalipun hari telah akan kiamat (lihat Hadist Riwayat Ahmat)

Prinsip keadilan, imbalan yang profesional atas apa yang telah dikerjakan (Q 35:31) atau membayar upah sebelum keringat seseorang kering seperti yang diriwayatkan dalam Hadist Rasulullah SAW.

Dan masih banyak prinsip-prinsip lain yang dapat kita temukan jika kita ingin menggali kekayaan Al-Qur'an dan Hadist tentang profesionalisme: jika profesionalisme berjalan dalam koridor Islam, sudah mencakup seluruh teori atau konsep profesionalisme apapun.

C. PENUTUP

Berdasarkan kedua konsep dasar dan beberapa prinsip yang membentuk profesionalisme menurut Islam maka bias disimpulkan bahwa setiap pribadi muslim harus membekali dirinya dengan kompetensi ilmu pengetahuan yang memadai, meningkatkan keterampilan dalam bidang teknologi dan komunikasi global, menunjukkan keteladanan Akhlak mulia (nilai kejujuran, Independensi, Integritas, dan Obyektivitas) dan memahami secara proporsional antara prestasi dan kontraprestasi (Keadilan reward dan punishment) untuk dapat mewujudkan kepribadian sebagai seorang pekerja muslim yang profesional.

Dengan demikian profesionalisme berdasarkan konsep Islam perlu dikedepankan karena profesionalisme dalam Islam didasarkan pada dua pilar utama yaitu bekerja sebagai amanah dan berprestasi sebagai ibadah.

Penggalian konsep-konsep manajerial dengan dasar-dasar keislaman ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konseptual Manajemen Sumberdaya Manusia (Human Resources Management) yang digali dari Al-Qur'an dan Al Hadist untuk menambah kekayaan khasanah ilmiah ilmu pengetahuan.

11. ANCAMAN MAUT JALINSUM KITA

A. PENGANTAR

Jalinsum adalah singkatan dari Jalan Lintas Sumatera yaitu ruas jalan negara yang melintasi dan menghubungkan Sumatera Utara dengan provinsi tetangga lainnya yaitu Aceh, Riau dan Sumbar. Idealnya jalinsum merupakan infrastruktur utama transportasi untuk kegiatan ekonomi dan kepentingan masyarakat luas. Tapi sayangnya Jalinsum malah menjadi lintasan maut karena tingginya angka kematian akibat kecelakaan yang terjadi pada ruas jalinsum. Jadi tidak berlebihan jika penulis menyebut istilah Jalinsum dengan kepanjangan Jalan lintas sumber maut (Jalinsum).

Sebut saja kecelakaan beruntun yang terjadi tgl. Rabu, tanggal 10/08/2016 antara mobil angkutan umum jenis mini bus dengan kendaraan pribadi yang menelan korban jiwa sebanyak 7 orang di jalinsum kec. Talawi, Kab. Batubara dengan kondisi korban yang sangat tragis. Sebelumnya tgl.13/07/2016 juga terjadi kecelakaan beruntun bus antar provinsi yang juga menewaskan 7 orang di ruas jalinsum Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan masih banyak sederetan kecelakaan lainnya, yang kita cermati dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Data polda Sumut tahun 2015 saja secara umum tercatat 5.832 Kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 1.659 orang.

Mengapa angka kecelakaan di Jalinsum sangat tinggi, tentunya dapat dibahas dalam berbagai perpektif tapi setidaknya ada 5 (lima) faktor sebagai dasar analisa kita bersama yaitu, (1) kedisiplinan dan kepatuhan lalulintas pengguna jalan (2) kondisi fisik jalan (3) Konsistensi penegakan hukum oleh pihak yang berkompeten (4) Aspek teknis kendaraan, dan (5) sarana pendukung jalinsum. Tulisan ini tentunya akan mendiskusikan kelima aspek tersebut agar masyarakat luas dan pemerintah selaku pembuat kebijakan dapat menyadari pentingnya keselamatan di Jalinsum dan korban maut tidak terus bertambah.

B. KEDISPLINAN DAN KEPATUHAN BERLALULINTAS

Kedisiplinan dan kepatuhan berlalulintas pengguna jalan saat ini sudah memasuki tahap yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Setiap hari di jalan raya kita melihat langsung dan merasakan betapa tidak tertib dan tidak disiplinnya pengguna jalan. Kampanye pelopor keselamatan yang terus disuarakan oleh pihak Kepolisian juga tidak disahuti secara serius oleh masyarakat.

Bahkan untuk menunggu lampu merah selama 30 detik saja para pengendara tidak mau bersabar walaupun risikonya adalah kecelakaan fatal. Sebenarnya kepatuhan memiliki hubungan garis lurus dengan penegakan aturan, artinya semakin aturan ditegakkan secara tegas mestinya kepatuhan semakin tinggi. Tapi kenapa faktanya berbanding terbalik? berarti kita masih belum patuh karena memang aturan belum ditegakkan secara benar.

Kenapa razia rutin untuk menegakkan kepatuhan lalu lintas selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil dan tidak memberikan efek jera bagi pengendara dan pengguna jalan? Mungkin itu salah satu masalah besar yang harus dicarikan solusinya. Kenapa orang Indonesia bisa disiplin saat berada di luar negeri, apakah karena aturan atau kesadaran, dan setelah balik ke Indonesia menjadi tidak patuh?

C. KONDISI FISIK JALAN

Sudah pasti kita semua tahu kondisi jalinsum kita di Sumut, antara lain seperti sempitnya badan jalan, rendahnya kualitas pengaspalan, banyaknya ruas jalan yang rusak, banyaknya badan jalan yang digunakan untuk kepentingan lain seperti pedagang kecil yang berjualan persis di bahu jalan. Jawaban pemerintah daerah atas masalah ini biasanya selalu dengan jawaban alasan klasik, yaitu jalinsum adalah jalan negara dan bukan kewenangan pemerintah daerah, anggaran perbaikan jalinsum sangat yang terbatas, pembangunan jalan tol trans Sumatera sedang dalam proses, anggaran perbaikan jalinsum sedang diusulkan ke pemerintah pusat melalui Balai Jalan Kementerian PU, dan terakhir alasan sulitnya pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Masalah ini juga tidak dapat diselesaikan walau dibahas puluhan tahun oleh pemerintah.

D. KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM

Sulit dibayangkan pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang telah terbit puluhan tahun. Masih banyak tumpang tindih trayek yang berdampak tidak sebandingnya jumlah angkutan dengan potensi penumpang, sehingga para awak angkutan umum saling berkejar-kejaran di jalan dan melacu dengan kecepatan super tinggi untuk mengejar penumpang yang terbatas guna memenuhi setorannya masing-masing, sehingga mengabaikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Belum lagi uji kelayakan kendaraan yang tidak jelas standarnya dan hanya berlaku sebatas dokumen speksi rutin yang distempel. Terminal liar terus beroperasi dan hanya ditertibkan menjelang pencitraan masa pemilukada, jembatan timbang yang tidak terkontrol secara baik sehingga tonase kendaraan melebihi kapasitasnya.

E. PENUTUP

Tentunya masyarakat sumut harus menyadari ancaman maut yang mengintai setiap saat di jalinsum. Berhati-hatilah membawa kendaraan, jaga kecepatan laju kendaraan apalagi membawa keluarga dan kerabat. Jangan lagi jatuh korban kecelakaan di jalinsum. Kita Semoga

12. PELABUHAN HUB INTERNASIONAL DI KUALA TANJUNG

A. PENGANTAR

Dua tahun yang lalu tepatnya, Selasa, 27 Januari 2015 Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara untuk meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, di Kabupaten Simalungun serta berkunjung ke PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) di Kabupaten Batubara. Kedatangan Presiden menjadi sinyal positif bagi masyarakat Sumatera Utara dengan diresmikannya KEK Sei Mangkei yang artinya Sumut memiliki dua kawasan strategis berskala internasional yang diharapkan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak luas bagi peningkatan perekonomian masyarakat khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kedua kawasan yang dimaksud adalah KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun dan Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kab. Batubara.

B. PELABUHAN KUALA TANJUNG

Kelayakan Proyek PLTA, Pabrik peleburan aluminium. dan pelabuhan Kuala Tanjung dilakukan oleh **Nippon Koei**, sebuah perusahaan konsultan Jepang. **Master Agreement** antara Konsorsium perusahaan Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA) dengan Pemerintah RI yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo.

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK **Presiden No.5/1976** yang melandasi terbentuknya Otorita pengembangan Ppoyek Asahan meliputi :

- 1. PLTA
- 2. Pabrik peleburan
- aluminium
- 3. **Pelabuhan Kuala**
- **Tanjung**

Surat Keputusan **Presiden RI No.5/1976 Pengembangan otorita Proyek Asahan meliputi Electric Power Plant Smelter dan Port**

C. MENYAMBUT MEA

Pemberlakuan MEA dengan Potensi pasar mencakup 622 juta orang dan 270 diantaranya berada di Indonesia. Total Perdagangan Intra Asean diperkirakan 1,5 Trilyun \$US pertahun dan produk domestik bruto ASEAN sebesar 2,5 Trilyun \$US per tahun. Indonesia saat ini sedang menyiapkan tiga klaster Kawasan industri hilir kelapa sawit di Sei Mangkei Simalungun (Sumatera Utara), Dumai (Riau) dan Kutai Timur (Kalimantan Timur).

Sementara itu Malaysia telah terdapat 6 (enam) Palm Oil Industrial Clusters yang terdapat di Tanjung Langsat, Kuantan, Tanjung Manis, Bintulu, Sandakan dan Lahat Datu (POIC, 2012). Pergantian Pimpinan Pemerintahan mendorong pergantian Kebijakan di bidang Pelabuhan contoh : Kasus pelabuhan Kuala Tanjung

Permasalahan tatakelola dan birokrasi yang buruk masih terus berlangsung seperti dweling time dan daya saing infrastruktur pelabuhan. Memaksakan pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan Hub Internasional , padahal terdapat potensi pelabuhan-pelabuhan yang ada di selat Malaka , dan Tidak berani berhadapan langsung dengan pelabuhan kompetitor yang ada di selat malaka

D. REKOMENDASI

Menyikapi permasalahan yang muncul, maka Penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Riset Daerah Sumatera Utara melalui Pemprovsu memberikan kajian singkat dan policy brief (kerangka Kebijakan) untuk mempertahankan Kuala Tanjung sebagai Pelabuhan Hub Internasional
2. Seluruh Stakeholder terkait seperti Pemerintah Kabupaten Simalungun, Batubara untuk memberikan dukungan secara kongkrit kepada Pemerintah Pusat Melalui Kemendagri, Kemenko perekonomian, Kemenko Maritim tentang permasalahan KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung
3. BUMN melakukan koordinasi dan konsolidasi dukungan yang disampaikan kepada Menteri BUMN untuk penguatan KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung
4. Kadin, dunia usaha, asosiasi profesi melakukan sinergitas terpadu untuk mendukung keberadaan pelabuhan Kuala Tanjung, dan KEK Sei Mangkei sebagai kawasan andalan percepatan perekonomian Sumatera Utara

13. PERANAN KELITBANGAN DAERAH

(Ditulis bersama Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si dan Ir. H.M.A Efendy Pohan, M.Si, Kepala Balitbang Provsu)

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sudah berjalan dan terus mengalami penyempurnaan secara faktual dapat dikatakan menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkrit dan konsisten. Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya juga telah dilakukan untuk mendukung pencapaian otonomi daerah yang lebih baik.

Menghadapi permasalahan yang timbul sebagai implikasi penerapan otonomi daerah, sesungguhnya memiliki dimensi yang luas dan bersifat komplikatif, khususnya menyangkut aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam kapasitas peran dan fungsinya, pada kenyataannya para penyelenggara pemerintahan harus berada di tengah persoalan yang terjadi dan berkembang secara nasional dan di hampir semua Daerah saat ini. Dalam hal ini tanggungjawab penetapan dan penyelenggaraan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk berbagai kebijakan publik adalah dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan seperti halnya provinsi Sumatera Utara.

Balitbang Depdagri tahun 2007, menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah seyogianya mampu menjadi motivator dan fasilitator yang handal dalam upaya percepatan otonomi daerah, sekaligus menjadi mediator bagi kepentingan hajat hidup masyarakat secara luas. Ini semua tentunya dapat diwujudkan melalui suatu kearifan dalam perumusan langkah dan kebijakan yang secara berkualitas dapat menjadi payung dan tuntunan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah saat ini.

Disinilah dukungan jejaring atau stakeholders pemerintahan sangat diperlukan dalam mengemban posisi strategis tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, baik dalam lingkungan institusi pemerintahan itu sendiri maupun non-pemerintah.

B. FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM Mendukung Pemerintah Daerah

Perspektif pembangunan Iptek Daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang *Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek*. Sebagaimana tercantum dalam *Pasal 21 Ayat (4)*, disebutkan bahwa peran dan fungsi Balitbang diperlukan dalam penumbuhkembangan motivasi, pemberi stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek .

Atas berbagai pertimbangan peran dan fungsi strategi tentunya peranan Penelitian dan Pengembangan merupakan kegiatan dalam rangka mencari kebenaran, baik yang bersifat *epistemologi* maupun yang bersifat empiris. Keberadaan penelitian dan pengembangan harus mampu mengungkapkan timbulnya gejala-gejala ketidaklurusan, harus mampu memecahkan segala permasalahan yang berkembang, serta harus mampu memberikan solusi yang tepat dengan jalan menghimpun, mengolah, dan menganalisa data secara *representatif, obyektif, valid, dan reliable*. Dengan demikian hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah, baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Balitbang sebagai sub sistem (mata rantai) manajemen diharapkan dapat mensinergikan su-sub sistem manajemen Pemerintah daerah seperti pada gambar terlihat fungsi *Planning* dilaksanakan oleh Bappeda, fungsi *Organizing* dilaksanakan oleh jajaran sekretariat daerah, fungsi *Actuating* dilaksanakan oleh instansi-instansi yang ada di jajaran pemerintah daerah. Fungsi *Controlling* dilaksanakan oleh Inspektorat dan Fungsi R&D (*Riset and Development*) dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

Di dalam ilmu manajemen terlihat dengan jelas fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Orgaizing, Actuating* dan *Controlling*, akan tetapi agar fungsi-fungsi itu dapat di design dengan baik haruslah melalui peranan R & D. Demikianlah diharapkan peranan R & D yang penting ini dan dilembagakan dalam struktur manajemen Pemerintahan diharapkan mampu melaksanakan fungsi R & D.

C. KONDISI OBJEKTIF BALITBANG PEMPROVSU

Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprovsu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas membantu Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan penelitian dan pengembangan yang dapat dipergunakan dalam mendukung pembangunan daerah, maka visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan dikaitkan dengan pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pemprovsu dalam pengambilan keputusan dalam rangka percepatan pembangunan di Sumatera Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka prinsip-prinsip pelaksanaan kelitbangan diarahkan dalam rangka penerapan kaidah-kaidah ilmiah secara ketat dengan memegang teguh etika penelitian dan kode etik peneliti untuk menjamin integritas hasil kelitbangan, profesional dan kelembagaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip ilmiah, tepat, jujur, bertanggungjawab, beretika, profesional, berkeadilan, terbuka, pengakuan dan pendanaan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sejak berdiri tahun 2001, Balibang Pemprovsu telah melakukan berbagai kajian yang mendukung pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Kegiatan dan Anggaran BALITBANG

No	Tahun	Jumlah Kegiatan Penelitian	Besarnya Anggaran
1	2002	3	1.923.339.000,-
2	2003	13	2.735.368.000,-
3	2004	11	3.238.841.000,-
4	2005	19	4.263.608.000,-
5	2006	21	4.005.559.000,-

6	2007	20	5.842.125.784,-
7	2008	18	5.997.229.487,-
8	2009	15	2.825.313.775,-
9	2010	22	3.015.813.775,-
10	2011	59	8.824.580.000,-
11	2012	36	7.663.612.000,-
12	2013	23	6.265.150.000,-
13	2014	9	3.706.920.000,-
14	2015	8	2.920.000.000,-
15	2016	8	2.000.000.000,-

Jumlah personalia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balitbang di rinci pada tabel berikut:

Tabel 4. SDM BALITBANG

No	Kategori	Jumlah orang
1	ASN Struktural	16
2	ASN Fungsional Peneliti	7
3	ASN Fungsional Umum	36

Beberapa kajian aktual strategis yang digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan Pemprovsu adalah :

- a. Penelitian Model Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Sumatera Utara.
- b. Penelitian Tentang Prestasi Kerja Dan Penghasilan PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- c. Penelitian Tentang Pelayanan Publik Pada Kantor Samsat Medan Utara Provinsi Sumatera Utara
- d. Kajian Tentang Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis TTG Di Sumatera Utara
- e. Kajian Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Bagi Pelaku UMKM Di Sumatera Utara

f. Kajian Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Sumatera Utara.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbang Provsu yaitu :

- a. Program Diseminasi Informasi Teknologi, dengan kegiatan :
- b. Rapat Koordinasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- c. Evaluasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Litbang
- d. Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- e. Pendataan Hasil-Hasil Penelitian dalam Berbagai Ilmu kajian Bidang Pemerintahan, dan Masyarakat, Sosial Budaya, Ekonomi Pembangunan, dan Sumber Daya Alam dan Maritim
- f. Penyusunan dan Penerbitan Media Sosialisasi Balitbang Provsu
- g. Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
- h. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara
- i. Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lotus Balitbang Provsu
- j. Penyusunan buku rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan

Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan produksi sawit melalui Desiminasi Benih Unggul dan Kultur Teknis
- b. Implementasi program ISSE sebagai daya dukung ketahanan pangan dan energi
- c. Pengembangan berbagai jenis produk Coco Butter Substitute (CBS) hilirisasi sawit berbasis IKM

Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan kegiatan :

- a. Penelitian/Kajian Bidang Pemerintahan dan Kemasyaratan
- b. Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- c. Penelitian/Kajian Bidang Sosial Budaya
- d. Penelitian/Kajian Bidang SDA dan Maritim
- e. Kajian Aktual Balitbang Provsu
- f. Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Litbang Bidang Pemerintahan dan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan, Sosial Budaya, dan SDA dan Maritim.
- g. Kerjasama penelitian dengan berbagai kementerian diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Hukum dan HAM.

- h. Kerjasama penelitian dengan lembaga litbang Kabupaten/Kota dan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, pusat, balai dan lembaga penelitian lainnya di Sumatera Utara.
- i. Kerjasama pelaksanaan kegiatan melalui pengelolaan dana CSR.

Sedangkan prestasi yang telah dicapai adalah

- a. Penghargaan Pelopor Penerapan Penguatan SIDA Di Indonesia Tahun 2013

Penghargaan ini diserahkan dalam acara puncak Hari Teknologi Nasional di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 30 Agustus 2013. Gubernur Sumatera Utara saat itu H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si., menerima penghargaan pelopor penerapan penguatan Sistem Inovasi Daerah (Sida) dari Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta. Penghargaan Pelopor SIDA merupakan apresiasi sekaligus pengakuan pemerintah pusat kepada kepala daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat SIDA.

Sumatera Utara dan sepuluh provinsi lainnya dinilai telah menunjukkan komitmen dalam mengambil prakarsa untuk mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset dan Teknologi tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Penghargaan Pelopor SIDA diberikan kepada 11 kepala daerah setingkat provinsi dalam acara perayaan puncak Hari Teknologi Nasional yang mengambil tema Inovasi untuk Kemajuan Bangsa dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden RI BJ Habibie. Gubsu bersama Gubernur Bengkulu, Lampung, Sumsel, Banten, Jawa Barat, Jateng, Jatim, Kaltim, Sulawesi Selatan dan Gorontalo telah mengambil prakarsa tidak saja dalam membentuk Tim Koordinasi SIDA di daerah tapi juga telah menyusun Roadmap Penguatan SIDA juga menyusun *actionplan* secara detail. Pelaksanaan SIDA bagian dari pengembangan Sistem Inovasi Nasional (SINAS) yang dilandasi oleh UU No 18 tahun 2002 tentang Sisnas Libang Iptek.

- b. Anugerah Iptek Pemerintah Provinsi (BUDHIPURA) Bidang Penguatan Jaringan Iptek Tahun 2014

Anugerah Iptek ini diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atas dasar kepeduliannya terhadap implementasi Sistem Inovasi Daerah di dalam wilayahnya yang membawa kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan jejaring iptek sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Anugerah tersebut diberikan oleh Presiden RI yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono pada acara puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke-19 Tahun 2014 bertempat di Gedung Kementerian Riset dan Teknologi RI pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 di Jakarta.

D. KESIMPULAN

Peran yang diemban oleh Balitbang Pemprovsu sangat besar dan terus berkembang, karena Balitbang mempunyai fungsi, yakni:

- a. Sebagai perangkat pendukung, berkewajiban untuk memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan bagi Kepala Daerah yaitu Gubernur Sumatera Utara
- b. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Namun untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya, Balitbang perlu ditindaklanjuti dengan dukungan politis dari Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaannya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan penelitian dan pengembangan sangat diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di Daerah, terutama dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan di era otonomi daerah.
- b. Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan pengambilan langkah dan kebijakan, karena rekomendasi yang dihasilkan didukung oleh data dan fakta yang *valid*.
- c. Selain diperlukan dalam hal identifikasi masalah-masalah strategis baik yang bersifat aktual maupun potensial, termasuk yang diprediksikan akan dihadapi pemerintah daerah dalam jangka menengah atau jangka panjang, fungsi penelitian dan pengembangan juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Kepala Daerah dalam

pengambilan langkah dan kebijakan strategis jangka pendek untuk menyikapi dinamika dan situasi di daerah.

- d. Keberadaan penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni:
 - ✓ Peran di awal, yakni sebagai input dalam proses penyusunan langkah-langkah atau kebijakan strategis Daerah ke depan.
 - ✓ Peran antara, yakni untuk memberikan berbagai input/rekomendasi dalam rangka implementasi program-program strategis Daerah yang tengah berjalan. Hal ini berguna, baik sebagai kontrol maupun *katalisator* dalam pencapaian sasaran program.
 - ✓ Peran di akhir, yakni memberikan input dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program sebagai bentuk evaluasi, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.
- e. Untuk mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan, Pemerintah Daerah seyogianya mendukung keberadaannya, baik dari aspek kelembagaan, personil, maupun pembiayaannya.
- f. Mengingat peran dan fungsi strategis penelitian dan pengembangan, maka hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membentuk institusi penelitian dan pengembangan di Daerah secara mandiri.

E. REKOMENDASI

Rekomendasi tulisan ini adalah :

- ❖ Pemprovsu diharapkan dapat Mendudukan peran strategis Balitbang dalam organisasi dan mekanisme kerja pemerintah daerah secara luas, sehingga tidak terjadi duplikasi peran dan fungsi dengan unit kerja SKPD lainnya di jajaran Pemprovsu
- ❖ Pemprovsu dapat mempertimbahan Pengadaan aparat Pejabat Fungsional Peneliti sebagai pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan;

Pemprovsu harus memberikan dukungan anggaran secara memadai bagi penyelenggaraan tugas-tugas kelitbang di Balitbang Pemprovsu

14. MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT DI SUMUT

(Ditulis bersama Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution, M.SIE, Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara)

A. LATAR BELAKANG

Populasi penduduk yang sedemikian besar serta mobilisasi penduduk pedesaan menuju perkotaan yang semakin meningkat setiap harinya, membutuhkan sistim perencanaan dan pengelolaan pemerintahan yang semakin canggih dalam arti cepat, tanggap (responsip), jauh kedepan (futuristic) dan terbuka (transparan), dari semua aspek kebutuhan masyarakat seperti; transportasi, ekonomi, tenaga kerja, keamanan, lingkungan, kesehatan, energy, sandang pangan, pendidikan dan lain sebagainya.

Hal tersebut mendeskripsikan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah semakin besar (*span of control* semakin lebar), dalam mengelola masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi kegiatan. Dalam kajian Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework) yang disusun oleh BAPPENAS, salah satu pilar yang perlu dibentuk adalah Electronic E-Government for Good Government dengan tujuan dapat mempercepat terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif. Badan Koordinasi Teknologi Informasi Nasional (BKTIN) juga telah membentuk bidang kelompok kerja pengembangan E-Government yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan E-Government.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah selanyaknya mengembangkan sistim informasi pengelolaan pemerintahan yang transparansi dengan menerapkan sistim E-Government

a. Tujuan Pembentukan E-Government

Tersedianya operasional jaringan informasi dan transaksi layanan public yang up to date, yang mudah untuk dijangkau dari berbagai lokasi, sepanjang waktu, ekonomis, efisien dan efektif.

b. Manfaat

- ✓ Dapat memudahkan dalam melakukan sistim pengendalian pemerintahan (sistim control)
- ✓ Dapat meminimalisasi kesalahan operasional penyelenggaraan pemerintahan, baik yang disebabkan, manusia, peralatan, maupun prosedur kerja.
- ✓ Dapat memastikan bahwa pekerja telah melakukan pekerjaan, sesuai dengan setandard yang ditetapkan atau direncanakan.
- ✓ Dapat Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- ✓ Dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Good Corporate Government).
- ✓ Dapat meminimalisasi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari, seperti berkurangnya pemakaian kertas, dan peralatan administrasi lainnya.

B. PERKEMBANGAN PEMBENAHAN E-GOVERNMENT

Dari sisi Lembaga non Pemerintah.

Dari sisi lembaga non pemerintah seperti Bank Dunia, UNDP (United Nation Development Programme), IBM Corporation, *US Departement of Treasury* menerapkan E-Government bagi pemerintah adalah untuk:

- a. Menggunakan teknologi informasi oleh semua agen pemerintahan yang mampu menciptakan hubungan dengan masyarakat, bisnis dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pemerintahan
- b. E-Government adalah membawa pemerintahan kedalam dunia internet dan bekerja berdasarkan waktu internet
- c. E-Government adalah sebuah perubahan global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pihak pemerintah kepada pihak yang terkait dengan pemerintahan.

Dari sisi Lembaga Pemerintah

Menurut Pemerintah Federal Amerika Serikat, Nevada salah satu Negara bagian di Amerika Serikat, Selandia Baru, Itali, Inggris, Asia Pasifik penerapan E-Government digunakan untuk

- a. Penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintah melalui internet atau media digital lainnya
- b. Menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat bisnis, dan pengguna lainnya
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi
- d. Mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat

Saat ini E-Government sudah diimplementasi di Surabaya, E-Budgeting, Jakarta Smart City Website, Command Center di Bandung, Ecillage di Banyuwangi, Layanan Paspor online oleh Dirjen Imigrasi, **E-Government Kab. Tanjung Timur.**

C. HAMBATAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Beberapa hambatan tersebut adalah :

- a. Budaya atau iklim kesadaran pentingnya dan berbagi informasi bagi masyarakat Indonesia masih sangat rendah
- b. Kebiasaan (perilaku) untk mendokumentasi data juga masih rendah, baik itu pemerintahan, akademisi, dan masyarakat. Sementara data masa lalu sangat diperlukan untuk mengestimasi masa yang akan datang.
- c. Konpotensi Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi, baik hard skill dan soft skillnya masih kurang di Indonesia
- d. Perangkat Teknologi Informasi sebahagian besar masih di import, sehingga pengembangannya infrastruktur sampai ke tingkat dasar memerlukan biaya yang tinggi.

D. KEBIJAKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI SUMATERA UTARA

Walaupun masih terdapat hambatan, tetapi penerapan E-Government termasuk kategori prioritas dan yang harus segera dilakukan di Sumatera Utara. Unit kerja Badan Informasi dan Pendataan yang terdapat di pemerintahan Provinsi dioptimalkan dengan membentuk unit pelayanan teknis Sistem Informasi Manajemen, yang bertugas mengelola sebagai backoffice, menyediakan dan mengelola transaksi informasi dan dokumen elektronik.

Tahapan Kegiatan;

- a. *Tingkat Persiapan* yang meliputi :
 - Pembuatan situs informasi di setiap lembaga
 - Penyiapan SDM
 - Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, dll;
 - Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk public
- b. *Tingkat Pematangan* yang meliputi :
 - Pembuatan situs informasi public interaktif
 - Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain
- c. *Tingkat Pemantapan* yang meliputi :
 - Pembuatan situs transaksi pelayanan public
 - Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
- d. *Tingkat Pemanfaatan* yang meliputi :
 - Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang integrasi.
 - Penyediaan ruang terbuka untuk pelayanan publik (Portal Pelayanan Publik)

E. PENUTUP

Dengan diimplementasikannya E-Government, di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akan menjadi contoh bagi Pemerintah Kota

dan Kabupaten untuk SMART CITY. SMART, jika dipanjangkan masing-masing hurufnya menjadi Spesific, Measurable, Accountability, Realiabe, Tangibilty.

15. KEBIJAKAN STRATEGIS TATAKELOLA PEMDA

A. LATAR BELAKANG

Perspektif pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek, sebagaimana tercantum dalam *Pasal 21 Ayat (4)*, disebutkan bahwa peran dan fungsi kelitbangan diperlukan dalam menumbuh kembangan motivasi, pemberi stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek di daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek.

Sejalan dengan UU No 18 tahun 2002 tersebut, Badan penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah seyogianya mampu menjadi motivator dan fasilitator yang handal dalam upaya percepatan otonomi daerah berbasiskan riset, sekaligus menjadi mediator bagi kepentingan hajat hidup masyarakat secara luas. Hal ini semua tentunya dapat diwujudkan melalui suatu kearifan dalam perumusan langkah dan kebijakan yang secara berkualitas dapat menjadi payung dan tuntunan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Disinilah dukungan stakeholder pemerintahan sangat diperlukan dalam mengemban misi strategis tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, baik dalam lingkungan institusi pemerintahan itu sendiri maupun non-pemerintah.

Salah satu tujuan Pemerintahan pada hakekatnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut disusun dalam suatu rencana strategis komprehensif yang tertuang dalam dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan pemerintahan sehingga capaiannya dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 terdapat satu misi yang berkenaan langsung dengan kelitbangan dan pengembangan iptek yaitu misu untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdayasaing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,

pengembangan, dan penerapan iptek menuju inovasi secara berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa untuk dalam negeri dan luar negeri.

Merujuk pada misi yang tertuang pada RPJMN tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) poin penting yang harus diakomodir oleh Dewan Riset Daerah (DRD) provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan dokumen kebijakan strategis daerah (Jakstrada) iptek, dan dokumen Agenda Riset Daerah (ARD) tahun 2017-2021. Adapun tiga poin dimaksud adalah :

1. Penguasaan dan pemanfaatan Iptek melalui penelitian, pengembangan dan inovasi
2. Reformasi dibidang hukum dan aparatur negara
3. Penguatan ekonomi domestik berbasis keunggulan wilayah/daerah

Mencermati ketiga masalah diatas, setidaknya pemerintah provinsi Sumatera Utara harus merumuskan kebijakan dan agenda kegiatan sampai tahapan implementasi ditingkat daerah agar dapat lebih mudah mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga akan terjadi keselarasan antara RPMJN, RPJMD, Jakstranas dan ARN dengan Jakstrada dan ARD.

Penguatan dan pemanfaatan iptek melalui kegiatan penelitian dan pengembangan memang harus dimasyarakatkan sehingga potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara yang berbasiskan pada sumber daya alam diyakini dapat menjadi modal dasar daerah ini dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan peran akademisi, birokrasi, dunia usaha dan masyarakat tentunya menjadi sangat penting karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara juga harus mau bergerak cepat secara dinamis untuk menyahuti aspirasi masyarakat yang saat ini semakin menuntut profesionalisme penyelenggara negara, sehingga tantangan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, mudah diakses, cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi tidak dapat lagi dihindari oleh Pemprov, sehingga berbagai kajian aktual harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan agar reformasi dibidang hukum dan aparatur negara dapat diwujudkan.

Disinilah peran Dewan Riset Daerah Sumatera Utara untuk memberikan masukan dalam bentuk dokumen jakstrada iptek dan ARD, khususnya dalam bidang tata Kelola pemerintahan agar dapat menjadi pedoman dan rujukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan khususnya bagi kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemrov, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada, serta seluruh stakeholder kelitbang di provinsi Sumatera utara. DRD provinsi Sumatera Utara saat ini yang bekerja dalam masa periode 2014-2019 mengemban tugas melaksanakan penyusunan Jakstrada Iptek dan Agenda Riset daerah Sumatera Utara tahun 2017-2021 sebagai dokumen rujukan kelitbang daerah yang diterbitkan dalam bentuk peraturan Gubernur. Dokumen jakstrada dan ARD ini nantinya diharapkan menjadi rujukan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.

B. ISU POKOK BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Permasalahan tata kelola pemerintahan adalah satu masalah utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pemerintahan (*Government*) menjadi baik atau buruk dikarenakan tata pemerintahannya (*governance*), karena itu muncullah istilah *good governance* (tata pemerintahan yang baik), dan sebaliknya muncul pula istilah *bad governance* (tata pemerintahan yang buruk). Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memiliki birokrasi berkualitas tinggi, sukses dalam menyediakan layanan publik, dapat mengelola anggaran negara yang efektif, tepat sasaran dan betul-betul untuk mensejahterakan rakyat, dilaksanakan secara demokratis, mudah diakses dan akuntabel.

Secara konseptual teoritis, menurut Handiwinata (2007), syarat bagi terciptanya good governance harus memiliki beberapa prinsip dasar, meliputi:

1. Partisipatoris

Yakni setiap pembuatan peraturan dan/ atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil – wakilnya)

2. Penegakan Hukum

Yakni harus ada seperangkat hukum yang menindak pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.

3. Transparansi

Yakni adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang – undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.

4. Responsif

Yakni lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan “basic needs” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil , hak politik, hak ekonomi, hak social dan hak budaya).

5. Konsensus

Yakni jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog / musyawarah menjadi konsensus.

6. Persamaan hak

Yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan.

7. Efektivitas dan efesiensi

Yakni pemerintah harus efektif dan efesien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara.

8. Akuntabilitas

Yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya, implimentasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan – perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak – pihak yang berkepentingan.

Kedelapan prinsip dasar tersebut, harus dipenuhi oleh suatu organisasi khususnya organisasi pemerintahan, agar good governance benar-benar terlaksana di suatu organisasi, baik tingkat pusat maupun daerah.

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki perkembangan sosial politik dan pemerintahan yang sangat dinamis. Hal ini terjadi karena kemajemukan masyarakat Sumut yang sangat heterogen akan tetapi disisi lain juga sangat kondusif, sehingga menjadi kekuatan sosial dalam mendukung capaian kinerja

pemerintah daerah dan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Walaupun, pemerintahan di provinsi Sumatera Utara mengalami kasus korupsi yang melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif, namun dengan langkah-langkah cepat Pemprovsum mampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik, kerna secara umum permasalahan yang terjadi di pemerintahan akan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara, sehingga upaya membangkitkan citra, reputasi pemerintah daerah harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, komprehensif dan masif dalam semua sektor pemerintahan dengan aksi-aksi nyata yang dapat dibuktikan oleh masyarakat itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini harus mampu memperhatikan beberapa isu strategis yang mengemuka didaerah ini, yaitu diantaranya adalah:

1. Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang juga merupakan perpanjangan pemerintah pusat yang ada didaerah, sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah harus benar-benar sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat
2. Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu pemerintah daerah yang di supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencegahan Korupsi atas dasar berbagai kasus hukum yang terjadi di Sumatera Utara dalam kurun waktu tahun 2010-2015.
3. Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom yang perlu adanya kajian keselarasan pembangunan yang komprehensif dan terpadu untuk peningkatan capaian pembangunan yang sama.
4. Provinsi Sumatera Utara kekurangan dana pembiayaan pembangunan , sehingga sering mengalami ketidak cukupan anggaran pembiayaan dalam hal pencapaian pembangunan
5. Provinsi Sumatera Utara berada dalam posisi geografis yang sangat strategis berhadapan langsung dengan negara Malaysia di selat Malaka yang menjadikan provinsi ini harus mampu bersaing secara regional dengan daerah-daerah lainnya
6. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah pusat pertumbuhan dan gerbang investasi wilayah barat Indonesia dengan potensi SDA khususnya di sektor perkebunan dan ketersediaan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pelabuhan Hub internasional menuntut adanya tatakelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada kemudahan akses, pelayanan prima dan transparansi tatakelola

publik agar daerah ini memiliki daya tarik dan daya saing investasi.

Kondisi isu-isu pokok tersebut diatas secara umum dapat digambarkan pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1.

Keterkaitan Permasalahan dibidang Tatakelola Pemerintahan

C. KEBIJAKAN STRATEGIS IPTEK DAERAH BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di provinsi Sumatera Utara maka kebijakan strategis yang harus ditetapkan adalah mencakup:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Balitbang Provsu untuk menjadi satu-satunya pusat kajian kebijakan pemerinthaan di Provinsi Sumatera Utara
2. Penguatan peran kelembagaan Dewan Riset Daerah agar lebih optimal dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan bagi kemajuan kelitbangan yang ada di Provinsi Sumatera Utara
3. Peningkatan sinergitas kelembagaan Balitbang, DRD, Bappeda provsu, Bappeda Kab/Kota, Lembaga Penelitian PTN/PTS, Pusat dan Badan Penelitian Kementerian, Badan Layanan Umum dan lembaga riset swasta untuk menjadi penggerak utama kelitbangan dalam mendukung pembangunan berbasis riset di Sumatera Utara

4. Penguatan jejaring kelitbang daerah dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan sinergitas antara semua stakeholder kelitbang yang ada
5. Meningkatkan anggaran kegiatan penelitian dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, dana CSR, hibah, sponsorship, dan grant riset
6. Mendorong terwujudnya penerapan hasil-hasil penelitian dan difusi iptek khususnya yang berbasis inovasi dan teknologi tepat guna agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia industri
7. Membangun kemitraan strategis penelitian, pengembangan dan penerapan iptek skala nasional maupun internasional
8. Mendorong publikasi ilmiah hasil-hasil penelitian kebijakan bidang pemerintahan dan bidang lainnya untuk perluasan diseminasi hasil-hasil penelitian
9. Memfasilitasi kemudahan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi semua produk-produk hasil penelitian sesuai dengan temuan dan hasil risetnya masing-masing
10. Mendorong SKPD untuk menggunakan dan memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil kajian dibidang pemerintahan dan tatakelola yang sudah dilaksanakan oleh Balitbang Pemprov
11. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama dengan pemprov melakukan penguatan dibidang litbang sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing.

D. AGENDA RISET BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Beberapa agenda riset bidang tatakelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Otonomi Daerah
2. Pemerintahan Desa
3. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Pembiayaan pembangunan
5. Akuntansi dan Audit Keuangan Daerah
6. Pelayanan kepada masyarakat
7. E-Goverment dan penerapan teknologi informasi
8. Kepercayaan Publik
9. Birokrasi dan Sistem Pemerintahan
10. Manajemen Strategis Pemerintah Daerah

E. TEMA RISET

Berdasarkan agenda riset yang telah ditetapkan sebelumnya maka tema-tema riset yang mencakup bidang tata kelola pemerintahan untuk kurun waktu 2017-2021 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel. 4
Agenda dan topik riset

Agenda Riset	No	Tema/topik Riset	Keluaran
1. Otonomi Daerah	(1)	Studi tentang pemuktahiran peraturan dan pelaksanaan dalam kebijakan otonomi daerah	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Studi dinamika politik lokal dalam era kebijakan otonomi daerah	Sda
	(3)	Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah : perspektif kewenangan pemerintah Pusat dan daerah	Sda
	(4)	Pengaruh otonomi daerah dalam percepatan pembangunan	Sda
	(5)	Kesenjangan otonomi daerah Kab/Kota Di Sumatera Utara	Sda
2. Pemerintahan Desa	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Efektifitas Pengelolaan dana desa di Provinsi Sumatera Utara	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Kondisi objektif Kapasitas Pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Utara	Sda
	(3)	Penelitian tentang Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Sda
	(4)	Pembuatan Profil investasi dan potensi ekonomi desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara	Sda
(5)	Pengembangan desa wisata di daerah destinasi wisata di Sumatera Utara	Sda	
3. Profesionalisme ASN	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Penelitian tentang efektifitas lelang jabatan dalam penempatan ASN yang profesional	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Penelitian tentang sistem penilaian kinerja bagi ASN berprestasi	Sda
	(3)	Penelitian tentang motivasi dan disiplin kerja ASN	Sda
	(4)	Penelitian tentang pemetaan kompetensi ASN di jajaran Pemerintah daerah	Sda
(5)	Penelitian tentang Sertifikasi profesi ASN	Sda	

4. Pembiayaan pembangunan	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Penelitian tentang potensi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Penelitian tentang alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah	Sda
	(3)	Penelitian tentang skala prioritas Pembangunan berbasis limitasi anggaran	Sda
	(4)	Penelitian tentang Fiskal Stres APBD Kabupaten Kota di Sumut	Sda
(5)	Penelitian model pembiayaan pembangunan swasta dan pemerintah sebagai alternatif percepatan pembangunan	Sda	
5. Akuntansi dan Audit keuangan Daerah	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Kepatuhan Standar Akuntansi pemerintah	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Pengembangan sistem Akuntansi Pemerintah	Sda
	(3)	Faktor penentu opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemda	Sda
	(4)	Efektifitas LHP BPK terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan dan akuntansi pemda	Sda
(5)	Profesionalisme Akuntan di Instansi pemerintah daerah	Sda	
6. Pelayanan Kepada masyarakat	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Studi efektifitas layanan dasar pemda kepada masyarakat	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Standar Pelayanan Minimal dalam berbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat	Sda
	(3)	Peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat	Sda
	(4)	One-Stop Service pelayanan yang terukur dan transparan	Sda
(5)	Peningkatan pelayanan yang berorientasi pada standar ISO	Sda	
7. E-Governmet dan Teknologi Informasi	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Pengembangan Aplikasi e-Government di Pemprov	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Resistensi dan penerimaan penerapan TI di Pemda untuk mendukung smart Province	Sda
	(3)	Peningkatan Kapasitas layanan Pemda berbasis Web Media	Sda
	(4)	Pengembangan sistem informasi manajemen Pemerintahan berbasis TI	Sda
(5)	Penerapan TI dalam mendorong transparansi Publik di Pemda	Sda	

8. Kepercayaan Publik	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Persepsi masyarakat terhadap pencegahan Korupsi di Pemda	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Persepsi masyarakat terhadap pemberantasan Pungutan liar di pemda	Sda
	(3)	Persepsi masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	Sda
	(4)	Persepsi masyarakat terhadap Eksekutif	Sda
9. Birokrasi pemerintahan	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Pengembangan sistem administrasi pemerintahan yang cepat dan akurat	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Pengembangan aplikasi nota dinas on-line	Sda
	(3)	Pengembangan sistem data based birokrasi pemerintahan	Sda
	(4)	Kajian tentang struktur organisasi perangkat daerah : kesesuaian SDM dan Kinerja	Sda
10. Manajemen strategis Pemerintah Daerah	No	Tema/topik Riset	Keluaran
	(1)	Penelitian tentang Rencana Induk Ekonomi Daerah	Rekomendasi kebijakan
	(2)	Penelitian tentang Rencana Induk Pendidikan daerah	Sda
	(3)	Penelitian tentang kesesuaian dokumen RPJMD dengan kebutuhan pembangunan dilapangan	Sda
	(4)	Penelitian tentang berbagai kebijakan berbasis riset	Sda
	(5)	Penelitian tentang daya saing Sumut dalam era MEA	Sda

F. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Strategis dan agenda riset daerah bidang tatakelola pemerintahan ini dibuat untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan dari seluruh pengurus dan anggota DRD.

16. PERJUANGAN TIM PON SUMUT

A. PENDAHULUAN

Pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 10 September 2016 bertempat di aula Martabe Pemprovsumu Kontingen TIM Pekan Olah Raga Nasional (PON) Sumut yang akan berlaga di PON ke 19 Provinsi Jawa Barat secara resmi dilepas oleh Gubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si dan pada kesempatan tersebut Gubsu berharap Sumut mampu memperbaiki peringkat perolehan medali atau setidaknya mampu mempertahankan apa yang sudah diraih pada PON ke 18 di Provinsi Riau tahun 2012 yang lalu.

Kontingen Tim PON Sumut kali dipimpin oleh ketua harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut Jhon Ismadi Lubis yang membawa 309 orang atlet untuk 35 cabang olah raga dari 44 cabor yang ditandingkan, serta official sebanyak 93 orang yang terdiri dari Pelatih, Tim Medis, serta pengurus KONI sesuai bidangnya masing-masing yang akan bekerja melayani semua keperluan kontingen selama berlangsungnya PON mulai tanggal 12 s/d 29 September 2016 yang even dan penyelenggaraannya tersebar di seluruh Kab/Kota se Jawa Barat.

Tentunya semua masyarakat dan khususnya insan olahraga di Sumut sangat mengharapkan Tim PON Sumut dapat meraih prestasi yang terbaik di PON ke 19, dan KONI Sumut juga telah bertekad untuk berjuang sepenuh hati dan sekuat tenaga dengan segala kemampuan teknis yang dimiliki serta skill setiap atlit pada cabornya masing-masing dengan suatu prinsip menjunjung tinggi sportifitas, siap menang dan siap kalah.

B. KILAS BALIK PRESTASI TIGA PON TERAKHIR

Jika melihat rapor prestasi Sumut pada tiga PON terakhir yaitu PON 18 di Provinsi Riau, PON 17 di Kalimantan Timur dan PON ke 16 di Provinsi Sumatera Selatan memang Sumut belum mampu menembus lima besar, namun setidaknya dua PON terakhir di Kaltim dan Riau Sumut sudah mampu menembus peringkat 10 besar secara nasional, lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahu	PO	Lokasi/	Juara	Peringk	Perolehan Medali
------	----	---------	-------	---------	------------------

n	N Ke	Tuan Rumah	Umum	at Sumut	Emas	Perak	Perunggu
2012	18	Provinsi Riau	DKI Jakarta	8	15	19	23
2008	17	Provinsi Kalimantan Timur	Jawa Timur	7	20	11	29
2004	16	Provinsi Sumatera Selatan	DKI Jakarta	12	15	15	12

Sumber : Kemenpora, 2016

Berdasarkan data tersebut diatas, terbukti pada kurun waktu 12 tahun, hampir tidak ada terobosan dalam pembinaan prestasi olahraga di Sumut, hal ini tentunya berawal karena pemprov tidak mampu mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembinaan prestasi olahraga secara berkelanjutan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang tetap berada pada papan atas lima besar peringkat PON yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur. Sangat prihatin, karena prestasi tanpa pembinaan yang berkelanjutan rasanya sulit dicapai.

KONI Sumut sebenarnya telah berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan anggaran yang terbatas untuk pencapaian prestasi yang optimal, dan hasilnya Sumut dalam dua PON terakhir masuk berhasil berada pada 10 besar nasional.

C. TARGET SUMUT PADA PON 19 DI JAWA BARAT

Ketua KONI Sumut Gus Irawan Pasaribu dalam kesempatan acara pelepasan kontingen mengatakan bahwa PON merupakan even strategis dalam pembinaan atlit dan menjadi tolok ukur atas latihan keras yang selama ini dijalani. Maknanya pembinaan atlit tidaklah gampang karena harus didukung sarana prasarana pelatihan yang memadai, dengan kesimpulan jika latihan seadanya maka prestasi juga seadanya saja.

KONI Sumut tetap optimis menembus lima besar nasional dan target itu menyebar dari sejumlah cabor unggulan seperti Wushu, Karate, Drum band, angkat berat dan angkat besi, tinju yang diprediksi mendulang medali., tentunya tidak tertutup juga kemungkinan semua cabor tetap berpeluang menyumbang medali baik emas, perak dan perunggu, karena semua Pengprov sudah memiliki targetnya masing-masing.

Menurut analisis Penulis dengan keterbatasan anggaran yang ada pada KONI Sumut di PON ini, target masuk 10 besar saja masih

sangat realistis. Argumentasi ini didasarkan pada kondisi riil Sumut yang harus bersaing dengan Provinsi yang lebih siap antara lain DKI Jakarta yang umumnya banyak membawa atlet pelatnas, Jawa Timur dengan anggaran yang tidak terbatas, Banten, Jawa Tengah dan DIY selaku provinsi tetangga penyelenggara, serta Jawa Barat sendiri selaku tuan rumah. Setidaknya pada peringkat akhir perolehan medali, Sumut diposisi 7 atau 8 saja itu sudah wajar.

D. MASA DEPAN PRESTASI OLAH RAGA SUMUT

Masa depan olah raga Sumut tentunya harus lebih baik dari masa lalu dan masa sekarang ini. Sejarah masa lalu mencatat banyak tinta emas prestasi yang ditorehkan oleh Sumut dalam berbagai cabang pentas nasional seperti Renang, polo Air, Sepakbola, Pencak Silat, Taekwondo, Tinju, Atletik, Hoki, Judo dan beberapa cabang lainnya yang mampu menghasilkan atlet SEA Games dan Asian Games asal Sumut yang ikut membela nama bangsa Republik Indonesia dalam even tingkat internasional.

Namun, sejarah masa lalu akan sulit terulang, jika pembinaan olahraga di Sumut tidak diberikan perhatian secara serius dalam jangka panjang. Bisa saja prestasi Sumut secara perlahan akan hilang dalam pentas perhelatan olahraga nasional.

Dua permasalahan mendasar yang selama ini dihadapi oleh KONI Sumut adalah minimnya anggaran dan kurangnya sarana prasarana olahraga yang berstandar. Untuk itulah melalui kolom opini ini Penulis selaku salah seorang pengurus pada Litbang KONI Sumut memberikan rekomendasi kepada para pihak yang berkompeten dan seluruh insan olahraga, hal-hal sebagai berikut :

1. Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Gubsu juga Ketua DPRDSU harus mampu menyampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Presiden RI untuk diteruskan kepada KONI Pusat dan PB PON agar pada PON ke 21 tahun 2024 mendatang Sumut dipercaya menjadi Tuan Rumah setelah PON ke 20 tahun 2020 yang diselenggarakan di Papua. Paling minimal adalah Sumut bisa menjadi tuan rumah bersama penyelenggara dengan Provinsi Aceh, seperti yang pernah digagas beberapa waktu yang lalu. Menjadi tuan rumah PON merupakan suatu langkah terobosan dan percepatan peningkatan prestasi olahraga, hal ini penting karena sebagai penyelenggara PON tentunya daerah akan mendapatkan

kesempatan pembangunan prasarana/Venue olah raga yang berstandar internasional sehingga sangat membantu pembinaan atlit yang berkelanjutan. Kondisi ini sudah dialami oleh Provinsi Jatim, Kaltim, Sumsel, Riau, sekarang Jabar dan sebentar lagi Papua.

2. Keterbatasan anggaran yang ada pada APBD Sumut sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran pada sektor olahraga harus disikapi dengan suatu kebijakan bersama Pemprovsu dengan 33 Pemkab/Pemko yang ada di Sumut. Hal ini juga penting untuk dilakukan bahwa harus ada konsorsium Gubernur/Bupati/Walikota membuat dana talangan bersama yang dihimpun dari dana sharing APBD ataupun dana CSR serta potensi sponsorship dunia usaha yang beroperasi di daerahnya masing-masing. Jika komitmen seluruh kepala daerah yang ada di Sumut mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota benar-benar dijalankan, maka penggalangan dana untuk pembinaan prestasi olahraga di Sumut lebih mudah dicapai. Apalagi selama ini Bupati/Walikota lebih cenderung mengalokasikan dana untuk KONI daerahnya saja, tidak salah kedepan Kab/kota memberikan sumbangan kepada KONI provinsi untuk kemajuan prestasi olahraga Sumut. Sumbangan tidak harus berupa uang tapi bisa juga misalnya dalam bentuk fasilitas pelatda, kelengkapan atlit, bantuan alat-alat latihan dan menyiapkan pelatih untuk cabang tertentu yang dapat meringankan beban belanja KONI Sumut serta Pengurus Provinsi cabang Olahraga. Sebagai ilustrasi jika setiap Kabupaten/kota dapat menghimpun dana talangan sebesar Rp. 500 jt saja maka sudah terkumpul dana sebesar Rp. 16, 5 Miliar, ditambah alokasi yang selama ini dari bantuan APBD Sumut sekitar 15 Miliar, jadi totalnya Rp. 31, 5 Miliar, sudah bisa dioptimalkan dalam keikutsertaan kegiatan PON dengan Target prestasi yang diharapkan.
3. Kerjasama kemitraan antara KONI, Pengurus Cabang Olah Raga, Perguruan tinggi harus lebih ditingkatkan dalam melakukan kajian peningkatan prestasi dan inovasi pembinaan atlit yang lebih mengarah pada cabor unggulan, sehingga prioritas arah prestasi lebih memiliki *road map* (peta jalan) yang mudah dicapai

E. PENUTUP

Semoga apa yang menjadi harapan, dan cita-cita kita semua dapat dicapai dimasa yang akan datang, tentunya PON Jabar ini merupakan suatu momentum penting bagi Kita semua sebagai titik awal pencapaian Prestasi sumut dalam pentas olahraga nasional. Semoga

17. REVITALISASI PENDIDIKAN AL-WASHLIYAH

*(Kado kecil untuk HUT ke 86 Al -Washliyah tanggal 30 November
2016)*

A. PENDAHULUAN

Organisasi Masyarakat Al-Jam'iyatul Washliyah adalah salah satu ormas berbasis keagamaan yang terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Pergerakan utama Al-washliyah adalah dibidang dakwah Islam dan bidang pendidikan mulai tingkat sekolah dasar/madrasah sampai jenjang perguruan tinggi baik pendidikan umum maupun pendidikan agama islam.

Tanggal 30 November 2016 Al-Washliyah telah memasuki usia yang ke 86 tahun, tentunya dengan usia yang demikian lanjut banyak perubahan berarti dan kemajuan yang telah dicapai ormas ini untuk kemashlatan umat islam. Secara khusus dibidang pendidikan, Alwashliyah telah memiliki Sistem Pendidikan Al-Washliyah (SPA) yang mengatur tentang seluruh standar, sistem, proses, mekanisme, evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Al-Washliyah yang ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional Al-Wahliyah No. KEP-065/PB.AW/XX/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Penyempurnaan Sistem Pendidikan Al-Jam'iyatul Washliyah.

Mengingat perkembangan kemajuan pendidikan secara nasional yang demikian pesat dengan terbitnya berbagai Peraturan Menteri, dan juga perubahan nomenklatur Kementerian pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, serta bergabungnya Pendidikan Tinggi dalam Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka Majelis Pendidikan Pengurus Wilayah Al-Washliyah Sumatera Utara mengusulkan revisi SPA dalam Rakerwil MP AW SU yang digelar tanggal 22 s/d 24 November 2016 yang lalu.

Kegiatan Rakerwil di laksanakan di Wisma Al-Kamal, Sibolangit, Kabuoaten Deli Serdang yang dibuka secara resmi oleh Gubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si. Pada kesempatan rakerwil tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Pengurus Wilayah AL-Washliyah Sumatera Utara dengan PT. Bank Sumut dalam berbagai hal.

Rakerwil juga menghadirkan narasumber kompeten pakar dan praktisi pendidikan dari Perguruan Tinggi, Kementerian Agama, Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Pengurus Besar Al-Washliyah yang memberikan materi untuk penguatan kualitas pendidikan AW.

Untuk itulah tulisan ini akan menguraikan secara garis besar tentang ide-ide dasar dan prinsip penyempurnaan Sistem Pendidikan Al-Washliyah dalam rangka revitalisasi pendidikan dilingkungan Al-Washliyah, sehingga melalui tulisan ini juga diharapkan menjadi sosialisasi secara luas untuk publik khususnya keluarga besar Al-Washliyah.

B. SISTEM PENDIDIKAN AL-WASHLIYAH (SPA)

SPA adalah satu sistem yang terpadu dari kegiatan pendidikan yang berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan Pendidikan Al Washliyah dan tujuan Pendidikan Nasional. Tentunya Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah, adalah pendidikan yang berakar pada ajaran Islam dengan ciri khasnya (*shibghah dan khittah Al Washliyah*) yaitu jiwa dari Mukaddimah Anggaran Dasar, Aqidah serta Tujuan Organisasi Al Washliyah, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu usulan perubahan yang mengemuka dalam Rakerwil MP AW SU adalah mengenai Ruang Lingkup SPA yang diharapkan harus mengacu pada standar Pendidikan Nasional (SNP) Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 13 tahun 2013. Kemudian juga ditambahkan pula prinsip kekhususan pendidikan ke Al-Washliyah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan SPA tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan Menengah. Tentunya jika SPA sudah mengacu pada SNP maka diharapkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Al-Washliyah kualitasnya menjadi lebih baik dan meningkat.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Al-Washliyah. Lingkup Standar Nasional Pendidikan yang dirujuk adalah meliputi:

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

2. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik

C. REVITALISASI PENDIDIKAN

Pada Organisasi Al-Washliyah, Majelis Pendidikan (MP) adalah satu-satunya majelis sebagai penyelenggara pendidikan Al Washliyah dari semua jenjang pendidikan. Kewenangan ini diatur sesuai tingkat kepengurusan yang ada yaitu :

1. Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar (PB) Al-Washliyah tingkat Pusat menyelenggarakan pendidikan Tinggi yang meliputi (a) Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Al Washliyah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau professional dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, pada program S1, S2 dan S3. Selanjutnya, (b) Akademi/Politeknik adalah pendidikan Tinggi Al Washliyah yang menyelenggarakan program pendidikan professional dalam satu cabang atau sebagian

- cabang ilmu pengetahuan dan keterampilan pada program ahli pratama (DI), Ahli Madya (DIII), dan Sarjana Terapan (D IV).
2. Majelis Pendidikan Pengurus Wilayah (PW) tingkat Provinsi menyelenggarakan pendidikan Menengah Atas yang meliputi (a) Sekolah Menengah Atas Al Washliyah yang selanjutnya disebut SMA Al Washliyah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan menengah dengan program pendidikan 3 (*tiga*) tahun, (b) Madrasah Aliyah Al Washliyah adalah Satuan pendidikan menengah dengan program pendidikan 3 (*tiga*) tahun, (c) Madrasah Al Qismul 'Aly (MAQ) Al Washliyah atau Madrasah Aliyah Diniyah Salafiah/'Ulya Al Washliyah merupakan kesatuan khusus pendidikan agama islam dengan program pendidikan 3 (*tiga*) tahun (d) Madrasah Aliyah Muallimin (MAM) Al Washliyah adalah satuan pendidikan khusus pendidikan agama Islam dengan program pendidikan (*tiga*) tahun, (e) Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK Al Washliyah adalah satuan pendidikan menengah untuk mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja dan pengembangan sikap profesional dengan program pendidikan 3(*tiga*) tahun.
 3. Majelis Pendidikan Pengurus Daerah (PD) tingkat Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan Menengah pertama yaitu (a) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP Al Washliyah merupakan kesatuan pendidikan dengan program pendidikan 3 (*tiga*) tahun, (b) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs Al Washliyah dengan program pendidikan 3 (*tiga*) tahun, (c) Madrasah Tsanawiyah Diniyah Salafiah/Wustho (MTsDS) Al Washliyah merupakan kesatuan khusus pendidikan agama Islam dengan program pendidikan 3(*tiga*) tahun.
 4. Majelis Pendidikan Pengurus Cabang (PC) tingkat Kecamatan menyelenggarakan (a) Sekolah Dasar (SD) Al Washliyah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (*enam*) tahun, (b) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Washliyah adalah satuan pendidikan dasar yang berciri khas Agama Islam dengan program pendidikan 6 (*enam*) tahun, (c) Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Salafiah'Ula (MIDS) Al Washliyah adalah pendidikan dasar yang menyelenggarakan khusus pendidikan agama Islam dengan program pendidikan 6 (*enam*) tahun
 5. Sedangkan untuk pendidikan prasekolah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudhatul Atfah (RA), Madrasah

Diniyah Awaliyah (MDA) Sejak Muktamar terakhir tahun 2012 penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Muslimat Al-Washliyah bukan lagi menjadi kewenangan Majelis Pendidikan Al-Washliyah pengurus Cabang/Kecamatan.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Revitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan PW.AW Sumatera Utara dimaksudkan untuk Memberikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat, umat islam dan khususnya warga Al-Washliyah, serta Mendukung pemerintah dalam mengupayakan perluasan akses pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk penguatan daya saing bangsa. Implementasi dari kegiatan revitalisasi ini dilapangan secara teknis adalah mencakup :

1. Penyempurnaan aturan dan regulasi internal organisasi dalam hal penyelenggaraan pendidikan disemua jenis dan jenjang pendidikan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan memperbaiki sistem tata kelola manajemen penyelenggaraan pendidikan
3. Merumuskan kembali indikator mutu lulusan pendidikan Al-Washliyah
4. Meningkatkan kualitas mutu dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dilingkungan Al-Washliyah
5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder
6. Mendorong peningkatan kualifikasi akademik guru sebagai tenaga pendidik menjadi guru profesional yang bersertifikasi
7. Meningkatkan kompetensi Guru melalui pelatihan profesi yang berkelanjutan
8. Membuat sekolah unggulan percontohan sebagai pilot proyek untuk menjadi model sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan bahasa asing.

Semoga apa yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Pengurus Al-Washliyah Sumatera Utara untuk penyempurnaan Sistem Pendidikan Al-Washliyah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dapat terwujud dan menjadi kado kecil ke 86 HUT Alwashliyah guna disahkan pada forum Rakernas Al-Washliyah yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017 mendatang di Batam, Kepulauan Riau. Amin YRA.